



Dr. H. Mardani, M.Eng

Revisi UU Pemilu **Penting Untuk** Hindari Ratusan PLT Jangka Panjang



Pilkada Serentak Di Akhir Kabinet, Menjepit Nasib Bangsa

KUTIPAN

Pemerintah enggan melakukan penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Padahal, semua fraksi di Komisi II DPR awalnya kompak mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu atas revisi UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016 sebagai inisiatif DPR.

Namun selepas Pemerintah menyatakan mendesak penyelenggaraan Pilkada serentak bersama Pilpres dan Pilg di tengah jalan sebagian pihak berbalik arah. Dalam hidup proses pemutar (U turn) atau berbelok adalah lazim, namun menjadi janggal jika awalnya antusias kemudian menjadi malas.

Ada beragam rupa alasan Pemerintah menumpuk pemilu di 2024, diantara yang utama dalihnya karena menjalankan amanat UU dan fokus dalam penanganan covid 19. Mendadak tersadar adalah baik, namun jika semua ternyata karena

motif yang 'gelap gulita' sungguh seajatnya mengkhianati rakyat.

Mengapa alasan ini terdengar nyaring setelah satu putaran Pilkada serentak tahun 2020 berlangsung dan penanganan covid ambruk dengan menuai sejumlah rekor; paling tinggi Se-Asia terpapar dengan tingkat mortality terbesar Se-Asean. Angka-angka pilu yang dicapai selama ini tidak pernah membuat tersadar pemangku kebijakan, darinya terserit tata kelola pemerintahan yang sungguh memprihatinkan.

Mengapa alasan seperti ini

tidak pernah muncul saat Pemerintah bersikeras mengebut pembaharuan UU Cipta Kerja dalam waktu singkat, padahal menyangkut ribuan pasal dan jutaan hajat hidup. Terlebih dalam prosesnya berdampak protes dipelbagai daerah dan memakan korban jiwa. Buktinya jalan terus.

Mengapa kegelisahan ini tidak mengemuka saat Indonesia masuk ke dalam lima besar kematian tenaga medis dan kesehatan di seluruh dunia. Ada terlalu banyak pertanyaan dari seluruh gejala politik ini.

Sungguh tindakan politik simplistik dan penalaran melingkar seperti ini menyimpan bara yang berbahaya. Karena dibalut alasan mulia, namun meninggalkan sikap dan laku lampah yang alpa.

The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020.

Indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia.

Keperntingan revisi UU Pemilu yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evalu-



Kita berharap lebih dari sistem demokrasi yang dijalankan saat ini mampu menghadirkan kesejahteraan, meminimalisir konflik, adanya perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemeirntahan. Demokrasi tidak hanya mengharap suara rakyat di hulu, namun mendorong hadirnya oligarki di hilir. Berputar-putar pada sekelompok orang yang rakus dan tandus nurani

asi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu. Sejumlah isu strategis perlu dibahas antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu, hingga perbaikan rekapitulasi yang lebih baik. Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman pemilu 2019.

Penyelenggaraan Pilkada serentak dinormalisasi pada 2022 dan 2023, agar kepemimpinan daerah di masa pandemi tetap dipimpin oleh kepala daerah definitif. Terlebih,

jika pilkada digelar pada 2024, beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik menjadi sangat berat.

Kita berharap lebih dari sistem demokrasi yang dijalankan saat ini mampu menghadirkan kesejahteraan, meminimalisir konflik, adanya perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintahan. Demokrasi tidak hanya mengharap suara rakyat di hulu, namun mendorong hadirnya oligarki di hilir. Berputar-putar pada sekelompok orang yang rakus dan tandus nurani.



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Politisi PKS: Revisi UU Pemilu Penting Untuk Menghindari Ratusan PLT Jangka Panjang

KUTIPAN

Mardani menjelaskan “Revisi UU Pemilu penting untuk memperbaiki kualitas pemilu sekaligus menghindari munculnya ratusan PLT dalam waktu yang sangat panjang. Ini perlu dilakukan untuk mencegah lahirnya tirani dan oligarki yang terstruktur

“Revisi UU Pemilu penting utk memperbaiki kualitas pemilu sekaligus menghindari munculnya ratusan PLT dlm waktu yg sangat panjang. Ini perlu dilakukan utk mencegah lahirnya tirani dan oligarki yang terstruktur
“Revisi UU Pemilu penting utk memperbaiki kualitas

pemilu sekaligus menghindari munculnya ratusan PLT dlm waktu yg sangat panjang. Ini perlu dilakukan utk mencegah lahirnya tirani dan oligarki yang terstruktur.” Tegas Mardani.

Mardani menuturkan bahwa kehadiran PLT sebagai pemimpin bukan langkah yang efektif karena bukan merupakan kepala daerah yang definitif.

“Di masa pandemi, dgn refocusing anggaran, pengambilan keputusan yg sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yg memiliki mandatory politik yg kuat.” Tutar Mardani

Selain itu, Mardani juga menyinggung ada beberapa partai yang menolak revisi pada saat di Baleg, di rapat Komisi II mereka memerlukan revisi.

“Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sebenarnya sudah selesai & sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi, Naif jika mempermasalahkannya di Baleg. Kenapa set back? sangat

tidak progresif dan menjadi wasting time.” Tutar Mardani.

Aleg PKS ini menegaskan bahwa jika ingin memiliki UU yang baik, jangan sampai UU tersebut mengatur terlalu detail.

“UU Pemilu jgn sampai mengatur terlalu detail seperti waktu TPS dibuka, isi kotak apa saja dll. Berikan distribusi pengaturan tsb pada peraturan KPU. Sehingga UU hanya bicara mengenai grand design yg besar.” Tegas Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

“Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sebenarnya sudah selesai & sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi, Naif jika mempermasalahkannya di Baleg. Kenapa set back? sangat tidak progresif dan menjadi wasting time



Ketua FPKS DPR: Pilkada **Sebaiknya** Diselenggarakan Pada 2022 atau 2023

KUTIPAN

Jakarta (02/01) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi,

pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak dikumpulkan semua (serentak) di tahun 2024.

Alasan Fraksi PKS, supaya ada kepemimpinan yang definitif & tidak terlalu panjang masa jabatan penjabat sementara.

"Jika pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali Pjs dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang definitif untuk kebijakan-kebijakan strategis," ungkap Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, penyelenggaraan pilkada di 2024 berdekatan dengan pemilu presiden-wapres dan pemilu legislatif akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar serta beban juga bagi penyelenggara untuk fokus mempersiapkannya.

"Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah. Padahal kepemimpinan daerah ini tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat," terang Jazuli.

Di samping itu, lanjut Jazuli, dengan pilkada dipisah dari pemilu presiden-wapres akan memperluas stok calon pemimpin nasional tersebut yang datang dari kepala-kepala daerah yang dinilai sukses oleh rakyat.

"Tentu ini bagian strategis yang harus kita pikirkan bersama," ungkap Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah. Padahal kepemimpinan daerah ini tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat



Anggota FPKS: Pelaksanaan Pilkada Tidak Perlu Bersamaan dengan Pilpres dan Pileg

KUTIPAN

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mengatakan bahwa sebagaimana putusan MK, pemilu serentak memiliki makna pemilihan presiden, DPR RI dan DPD RI dilakukan dalam waktu yang sama. Artinya pemilu serentak tidak mengikat pelaksanaan pilkada.

"Pelaksanaan pilkada lebih baik dikembalikan pada skema yang sudah berjalan sampai dengan saat ini," ujar Surahman.

Menurut Surahman Hidayat, Pilkada yang dilaksanakan dalam waktu yang sama memiliki beberapa kelemahan; Pertama, akan ada daerah-daerah yang memiliki Pjs dalam jangka waktu cukup lama (2 tahun).

"Akan ada daerah-daerah yang memiliki Pjs cukup lama sehingga dikhawatirkan akan

mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Pjs memiliki kewenangan dan dukungan masyarakat yang berbeda dibandingkan kepala daerah definitif," ujar Surahman.

Kedua, lanjut Anggota DPR asal Jawa Barat ini, pelaksanaan pilkada serentak memiliki potensi konflik yang lebih tinggi.

"Situasi masyarakat yang masih bingung menghadapi pandemi covid 19 yang belum terlihat ujungnya. Pilkada

serentak akan membuat situasi menjadi sensitif, sedikit pemicu dapat menimbulkan konflik horizontal," lanjut Surahman.

Ketiga, imbuhnya, biaya pilkada serentak dalam satu waktu akan membuat biaya pelaksanaan pilkada semakin mahal dan potensi angka golput semakin tinggi.

"Biaya pelaksanaan pilkada serentak itu lebih mahal dan angka golput semakin tinggi," ujar Surahman.

Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, Surahman berpendapat bahwa lebih baik pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan.

"Pelaksanaan pilkada tidak perlu dipaksakan dilaksanakan serentak dalam satu waktu baik tahun 2024 sebagaimana UU Pemilu maupun 2027 sebagaimana draft revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di baleg DPR RI," pungkas Surahman.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

"Lebih baik pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Pelaksanaan pilkada tidak perlu dipaksakan dilaksanakan serentak dalam satu waktu baik tahun 2024 sebagaimana UU Pemilu maupun 2027 sebagaimana draft revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di baleg DPR RI,

Politikus PKS Dukung Capres Harus dari Parpol di Revisi UU Pemilu: Kaderisasi

KUTIPAN

Jakarta (02/02) --- Salah satu ketentuan dari draf RUU Pemilu mengharuskan calon presiden berasal dari kader partai politik. Tidak hanya capres saja, begitu juga calon kepala daerah.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai ketentuan tersebut relevan. Sebab, akan ada kaderisasi yang baik di internal partai politik sebagai pengusung capres-cawapres.

"Pandangan pribadi saya memang bagus agar ada kaderisasi di tubuh parpol," kata Nasir Djamil, Senin (1/2).

Kendati demikian, dia menilai ketentuan itu harus diiringi ambang batas presidential threshold (PT) yang diadakan, sehingga tiap parpol bisa mengusung capres-cawapres meski tanpa koalisi.

"Tapi syaratnya presiden threshold harus dinolkan. Ini pendapat pribadi saya. Kalau president threshold dibesarkan angkanya, maka itu sama saja

akan adanya raksasa dan kurcaci," tambahnya.

Nasir menilai ketentuan capres harus berasal dari kalangan parpol tak berniat untuk menjegal calon-calon potensial nonparpol. Sebab, jika ingin maju dalam pencapresan maka calon tersebut bisa menjadi bagian dari parpol.

"Kalau soal menjegal menurut saya enggak ada. Tinggal orang tadi masuk dalam partai politik dan otomatis menjadi anggota parpol," katanya.

"Tapi jangan lagi nanti dibuat syarat bahwa minimal 5 tahun sebagai anggota parpol. Itu namanya mempersulit dan mengada-ngada. Rencana pengaturan soal calon harus dari parpol juga rentan

dibatalkan oleh MK," tambahnya.

Sebelumnya, ketentuan calon presiden dan kepala daerah yang harus berparpol dimuat dalam Pasal 182 ayat 2. Tertulis bahwa peserta pemilu, baik pilpres, pilkada, maupun pileg haruslah kader parpol. Aturan ini tidak berlaku bagi calon anggota DPD dan calon kepala daerah independen.

"Menjadi anggota partai politik peserta pemilu, kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang maju lewat jalur perseorangan," demikian bunyi Pasal 182 ayat (2) huruf dd dalam draf revisi UU Pemilu.

Ketentuan itu tak ada di UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"Ketentuan itu harus diiringi ambang batas presidential threshold (PT) yang diadakan, sehingga tiap parpol bisa mengusung capres-cawapres meski tanpa koalisi. Tapi syaratnya presiden threshold harus dinolkan. Ini pendapat pribadi saya. Kalau president threshold dibesarkan angkanya, maka itu sama saja akan adanya raksasa dan kurcaci



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

● KUTIPAN

Fraksi PKS Salurkan Bantuan Bencana Hasil Pemotongan Gaji Anggota Legislatif Pusat hingga Daerah



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Pemotongan gaji setiap ada bencana ini insya Allah menjadi komitmen kami di Fraksi PKS. Kita ingin menjadi bagian yang menggerakkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Hal ini juga wujud komitmen PKS untuk bersama-sama melayani rakyat”



Tembus 1 Juta Kasus, Aleg PKS: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Kasus covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1), dan hari ini (27/1) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian sementara jumlah angka kesembuhan juga cetak rekor sejumlah 10.974 pasien.

Menanggapi hal ini, Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisiplin-

an protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan. Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlihat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat

yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mustinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," papar Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berpendapat akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi. Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembandingan untuk mendapatkan maklumlah masyarakat. "Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%

lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statemen Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah

pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," urainya. Selengkapannya kunjungi fraksi.pks.id

KASUS COVID 19 DI INDONESIA

TEMBUS SEJUTA



Kasus Covid-19 di Indonesia hingga Selasa (26/01/2021) sudah mencapai angka 1.012.350 kasus. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya berjumlah 917.279 kasus.

Wilayah	Update : 26/01/2021	Total Kasus
■ INDONESIA		1.012.350
■ ASIA TENGGARA LAINNYA		917.279

BUANG JAUH-JAUH WACANA DAN ISU POLITIK YANG BIKIN GADUH

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi



KLAIM PEMERINTAH MAMPU MENANGANI KRISIS PANDEMI PATUT DIPERTANYAKAN

Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara

SAATNYA FOKUS PADA KEBIJAKAN YANG LEBIH TERUKUR

Pandemi sudah hampir setahun berlangsung dan angka resmi yang terpapar sudah tembus satu juta. Saatnya lebih fokus pada kebijakan yang terukur, konsisten dan memas-tikan semua kebutuhan untuk penanggulangan pandemi ini tersedia

JANGAN LUPAKAN KONDISI DARURAT DI RS & BEBAN KERJA NAKES

"Akan sulit jika pemerintah hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi pandemi. Jangan lupakan kondisi darurat yang ada di Rumah Sakit (RS) dan tenaga kesehatan kita. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan yang memadai, menambah ICU tanpa memperhatikan hal tersebut akan membebani pasien

PEMERINTAH HARUS MENGUBAH CARA KERJA PENANGANAN PANDEMI

Pemulihan ekonomi akan bergantung pada keberhasilan kedua aspek tersebut. "Selain keberhasilan vaksinasi yang akan menysar pada 70 persen penduduk, pemerintah harus mengubah cara kerja dalam penanganan pandemi agar ekonomi bisa segera pulih

Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital

KUTIPAN

Jakarta (03/02) — Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Kharis meyakini migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Diharapkan akan lebih banyak pihak yang dapat memantau langsung siaran

televisi. Kharis pun menekankan, KPI sebagai pengawas televisi dalam negeri, juga harus bergerak dalam melakukan pemantauan dengan langsung menyesuaikan diri.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan turut mengapresiasi kinerja KPI, KIP dan Dewan Pers saat ini. Sebagai penjaga gawang bagi institusi media dan penyiaran, harapannya ketiga lembaga dapat mengedepankan pengawasan dan sosialisasi bagi industri media agar dapat mengabarkan informasi yang valid dan berimbang.



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

"Migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh

Aleg PKS: Libatkan Influencer dalam Pendidikan Lemhannas, Agar Tercipta Semangat Medsos yang Baik

KUTIPAN

Jakarta (28/01) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf menyoroti keterlibatan influencer media sosial (medsos) yang dianggap sudah menjadi fenomena global dalam berbagai aspek, di antaranya politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Muzzammil menjelaskan, pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi 101 dan 170 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024. Dari kenyataan tersebut, ia mengusulkan agar influencer diberikan ruang, baik yang pro dan kontra dalam pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

"Sehingga mereka dapat berdebat secara sehat untuk memperkokoh negara demokrasi, negara hukum, dalam bingkai Pancasila, UUD

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana 4 Pilar MPR RI yang sering kita sosialisasikan kepada masyarakat." kata Muzzammil melalui akun pribadi twitternya usai mengikuti Rapat Komisi I bersama Gubernur Lemhannas RI dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Rabu (27/01).

Ketua DPP PKS tersebut menyebutkan, film drama dokumenter berjudul 'The Social Dilemma' memberi gambaran betapa besar pengaruh media

sosial bagi kehidupan masyarakat modern dalam artian positif dan negatif. Ia melanjutkan, dari data Indonesian Corruption Watch (ICW), pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,4 miliar untuk menggaet influencer yang menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian kepada mereka.

"Terlebih, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa pemerintah telah menggelontorkan setidaknya Rp 90,4 miliar untuk melibatkan para influencer. Itu artinya pemerintah sudah memberi perhatian besar kepada peran influencer." ucapnya.

Menurutnya, jumlah populasi milenial dan gen z di Indonesia berdasarkan data sensus 2020 berjumlah lebih dari 53%. Kelompok ini adalah generasi medsos, yang berdialog sehari-hari dengan medsos. Ia pun menutup cuitannya dengan berharap agar influencer direkrut dan



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.
Anggota Komisi I DPR RI

"Saya berharap kita dapat merekrut mereka dan dilibatkan dalam pendidikan Lemhannas, untuk menjadi bagian dari pengokohan kesadaran hukum, pencerdasan politik, kohesi sosial, dan menumbuhkan ekonomi kreatif.

dilibatkan dalam pendidikan Lemhannas RI.

"Oleh karena itu saya berharap kita dapat merekrut mereka dan dilibatkan dalam pendidikan Lemhannas, untuk menjadi bagian dari pengokohan kesadaran hukum, pencerdasan politik, kohesi

sosial, dan menumbuhkan ekonomi kreatif. Sehingga mereka muncul dengan amal jariah bukan dosa jariah dan kita berharap agar media sosial kita memberikan semangat yang baik untuk bangsa dan negara kita." pungkasnya.

Aleg PKS Minta Pemerintah Waspada Peredaran Vaksin Covid-19 Palsu Asal China

KUTIPAN

Kantor berita Xinhua melaporkan polisi di Beijing, Jiangsu dan Shandong menangkap kelompok yang diketuai seseorang bernama Kong. Kelompok itu memproduksi vaksin Covid-19 palsu yang berisi larutan garam sederhana.

Tasikmalaya (03/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menanggapi penangkapan 80 orang anggota kelompok kriminal yang memproduksi dan menjual vaksin Covid-19 palsu di China. Mereka tidak hanya menjualnya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. (Republika, 3/2/21)

Toriq pun meminta agar Pemerintah Indonesia semakin memperketat pengawasan terhadap pintu-pintu masuk ke Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menutup peredaran vaksin Covid-19 palsu asal China ke Indonesia.

“Seluruh Kementerian dan lembaga harus waspada dan berupaya memastikan vaksin

Covid-19 Palsu asal China tidak masuk ke Indonesia. Terutama kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi pada lalu lintas keluar masuk orang dan barang ke Indonesia”, ungkap Toriq Hidayat.

Toriq menambahkan, supaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) berkomunikasi dengan China mengenai penangkapan terhadap kelompok kriminal yang memproduksi dan menjual vaksin Covid-19 palsu oleh pihak Polisi China.

“Kabarnya kelompok ini juga telah menjual vaksin palsu ke luar China. Karenanya Kemlu RI harus segera memastikan kepada pemerintah China

kemungkinan vaksin palsu ini dijual ke Indonesia”, harap Toriq.

Toriq pun berharap besar vaksin palsu ini belum masuk ke Indonesia.

Kantor berita Xinhua melaporkan polisi di Beijing, Jiangsu dan Shandong menangkap kelompok yang diketuai seseorang bernama Kong. Kelompok itu memproduksi vaksin Covid-19 palsu yang berisi larutan garam sederhana.

Media milik pemerintah China itu menambahkan vaksin palsu tersebut di jual di China dan luar negeri tapi masih belum diketahui negara mana. Disebutkan Kelompok tersebut aktif sejak bulan September tahun lalu.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

“Seluruh Kementerian dan lembaga harus waspada dan berupaya memastikan vaksin Covid-19 Palsu asal China tidak masuk ke Indonesia. Terutama kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi pada lalu lintas keluar masuk orang dan barang ke Indonesia”

Nyatakan Sikap atas Kudeta Myanmar, Aleg PKS: Myanmar Perlu Belajar Proses Demokratisasi dari Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (02/02) --- Ketua DPP Fraksi PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN), Sukamta memberikan pernyataan atas sikap PKS terhadap Kudeta yang terjadi di Myanmar Selasa (02/02/2021).

Sukamta cukup prihatin atas peristiwa tersebut dan memberikan apresiasi atas sikap tanggap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang menyatakan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan semuanya dengan jalan yang terbaik.

"Kami juga mendorong agar pihak yang berkaitan dapat memperhatikan keselamatan semua warga negara di sana, terlebih kepada minoritas seperti etnis Rohingya. Saya kira ini bukan imbauan yang basa-basi atau omong doang,

tapi pernyataan harapan agar tercipta demokratisasi di mana-pun di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar" ujar Sukamta.

Ketua DPP FPKS BPPLN tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah Myanmar dapat belajar mengenai proses demokratisasi dari Indonesia.

"Karena Indonesia sudah pernah mengalami masa-masa tidak enak dalam konteks hubungan sipil-militer dan kita sudah berhasil melalui masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia." kata Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini

juga menambahkan bahwa pemerintah RI harus memiliki solusi jangka pendek dan jangka panjang.

"Dalam jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air." ujar Sukamta.

Pada jangka panjang, Sukamta berharap ASEAN dapat memperkuat fungsi dan kewenangannya agar krisis-krisis politik dan HAM yang terjadi di negara ASEAN dapat ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirim pasukan perdamaian.

Karena warga sipil yang rawan menjadi korban jika terdapat perang di dalam negeri, meskipun telah adanya hukum humaniter.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Dalam jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air.

Mengenai Revisi UU Pemilu, Anggota FPKS: **Harus Ada Landasan Kuat** Bila Menolak

KUTIPAN

Jakarta (30/01) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, **Mardani Ali Sera**, mengajak masyarakat untuk terlibat diskursus tentang revisi UU Pemilu, termasuk perdebatan mengenai perlu atau tidaknya UU ini direvisi dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Mardani dalam diskusi daring Indonesian Leaders Talk (ILT) ke-26 bertema "RUU Pemilu, Kehendak (Wakil) Rakyat?" yang digelar pada Jumat, 29 Januari 2021, pukul 20.00-22.00 WIB.

Beberapa fraksi di DPR RI menyatakan penolakannya terhadap RUU Pemilu, yakni PAN, PPP, dan PKB. Pihak pemerintah, melalui Kemendagri, menyatakan keberatannya terhadap RUU. Melihat prosesnya, RUU Pemilu kini telah masuk ke Baleg untuk diharmonisasi.

Mardani menyebut bahwa pada pembahasan di Komisi II semua setuju bahwa UU Pemilu perlu direvisi, namun beberapa partai justru kini menolak setelah masuk Baleg.

"Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sudah selesai. Sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi," ucapnya (29/1)

Mardani menekankan revisi UU Pemilu diperlukan berlandas pada evaluasi Pemilu 2019, ketika 894 petugas KPSS meninggal, serta proyeksi munculnya ratusan PLT (pelaksana tugas) akibat nihilnya Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Baginya hal ini dapat menjadi pertimbangan serius untuk merevisi UU Pemilu. Kemunculan PLT ditakutkan akan memunculkan oligarki yang terstruktur.

"Publik harus terlibat dalam diskursus RUU Pemilu ini.

Kalau tidak (ingin) ada revisi apa landasannya. Perlu landasan kuat. Kalau dibilang landasan untuk tidak revisi adalah biar tidak perlu (revisi) 5 tahun sekali, saya pikir ini sesuatu yang sangat naif. Dibanding dampaknya yakni dengan 2022 dan 2023 kita punya ratusan PLT akan terjadi ratusan PLT selama masa yang sangat panjang. Ini amat sangat berbahaya, bisa melahirkan tirani baru, bisa melahirkan oligarki yang terstruktur. Lalu koreksi pelaksanaan Pemilu 2019, ketika ratusan petugas KPSS meninggal. Revisi perlu agar kita tidak jatuh di lubang yang sama." ujar Mardani

Politisi PKS ini juga mengkhawatirkan polarisasi hebat pada Pemilihan Presiden 2019 lalu tetap akan berlanjut bila UU Pemilu tidak direvisi. Hal ini terjadi karena ambang batas pencalonan presiden yang cukup tinggi, yakni 20 persen. Mardani menawarkan revisi pada poin tersebut dengan menurunkan ambang batas pencalonan presiden menjadi 10% kursi atau 15% suara. Baginya menurunkan ambang batas adalah salah satu upaya menyehatkan demokrasi.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

"Pembahasan RUU Pemilu dari Komisi II sudah selesai. Sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi"

"Bongkar barrier to entry, maksimal 10% kursi atau 15% suara. Menurunkan threshold, presiden dan pilkada, merupakan bagian dari menyehatkan demokrasi. Karena dua kali pilpres, cuma 2 kandidat saja. Ini amat sangat membelah

masyarakat. Jadi kalau ada pembelahan masyarakat jangan salahkan masyarakat, tapi karena kita yang memang membuat pembelahan dengan membuat threshold tinggi," pungkasnya.
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik, Aleg PKS: **Belum Disosialisasikan Secara Baik**

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Anggota Komisi II dari Fraksi PKS DPR RI, Surahman Hidayat, menyampaikan bahwa kebijakan baru terkait Sertifikat Tanah Elektronik

yang tertuang pada Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak ada kesalahpahaman dalam implementasinya.

"Saya mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat di depan saya tentang kebijakan baru terkait penarikan sertifikat untuk disatukan pada buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (3) dan (4) ATR/BPN No.1 Tahun 2021," kata Surahman.

Lebih lanjut Surahman menjelaskan bahwa di dalam Pasal 16 ayat (3) berbunyi, "Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah

dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan."

Kemudian pada Pasal 16 ayat (4) disebutkan bahwa "Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data."

"Masyarakat mendapatkan informasi bahwa buku sertifikat tanah yang mereka miliki sekarang akan ditarik dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Mereka bingung dengan implikasi dari pergantian bentuk sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik dan bagaimana proses pergantian akan dilakukan. Apakah akan dilakukan secara gratis atau berbayar. Banyak pertanyaan yang saya dapat dari kebijakan ini," ujar Surahman.

Anggota Legislatif dari Dapil Jabar X ini melihat banyak distorsi informasi dari kebijakan

tersebut, karena memang tidak ada penjelasan yang cukup dari Kementerian ATR/BPN terkait tujuan dan bagaimana kebijakan ini akan diterapkan.

"Sosialisasi Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021 seharusnya sudah dilakukan dalam tahap perumusan, sehingga ketika kebijakan ditetapkan tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat," tegas Surahman.

Surahman menilai kebijakan sertifikat tanah elektronik sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Secara teori seharusnya sertifikat tanah elektronik akan lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan dengan sertifikat yang berbentuk buku dan akan memudahkan transaksi jual beli karena lebih mudah mengidentifikasi keaslian sertifikat tanah. Namun dalam pelaksanaannya akan sulit khususnya di daerah pedesaan, karena akses jaringan informasi dan pemahaman masyarakat terkait teknologi belum memadai, oleh karenanya sosialisasi kebijakan ini menjadi sangat penting," terang Surahman.

Anggota Komisi II dari



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

“Masyarakat mendapatkan informasi bahwa buku sertifikat tanah yang mereka miliki sekarang akan ditarik dan digantikan dengan sertifikat elektronik. Mereka bingung dengan implikasi dari pergantian bentuk sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik dan bagaimana proses pergantian akan dilakukan. Apakah akan dilakukan secara gratis atau berbayar. Banyak pertanyaan yang saya dapat dari kebijakan ini”

Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan terkait dengan pangkalan data yang digunakan.

"Harus jelas keberadaan

sertvernya, dan posisinya harus di Indonesia, karena ini terkait informasi penting dan sensitif," pungkas Surahman.

PKS Dukung KPK Usut Dugaan Aliran Dana Korupsi PTDI ke Setneg

KUTIPAN

Jakarta (28/01) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mendorong KPK mengusut aliran uang dugaan rasuah terkait pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang disebut mengalir ke sejumlah pihak di Sekretariat Negara (Setneg).

Lewat dugaan korupsi ini, menurutnya, KPK bisa membuktikan ke publik bahwa proses penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.

"KPK tegak lurus saja, kemudian buktikan pada masyarakat bahwa mereka bisa tajam ke atas," kata Nasir kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/1).

Ia mengatakan KPK harus mematahkan argumen yang berkembang di publik selama ini bahwa proses penegakan hukum selalu tumpul ke atas atau penguasa.

"Selama ini ada pesimisme hukum itu tidak bisa tajam ke atas, inilah KPK harus

membuktikan bahwa hukum itu bisa tajam ke atas," tutur Nasir.

Sebelumnya, KPK mengendus aliran uang hasil dugaan rasuah terkait pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran PTDI mengalir ke sejumlah pihak di Setneg.

Hal itu terungkap saat penyidik memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Piping Supriatna dan mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik Sukasah, Selasa (26/1). Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budiman Saleh.

"Kedua saksi tersebut didalam pengetahuannya terkait adanya dugaan

penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak tertentu di Setneg terkait proyek pengadaan service pesawat PT Dirgantara Indonesia," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (26/1).

Dalam menyikapi dugaan tersebut, KPK Tim telah memeriksa empat orang saksi yakni Kabiro Keuangan Sekretariat Kemensetneg 2006-2015, Suharsono; Manajer Penagihan PTDI 2016-2018, Achmad Azar; GM SU ACS PTDI 2017, Teten Irawan; dan eks Manajer Pemasaran ACS PTDI, Kemal Hidayanto.



Lewat dugaan korupsi ini, KPK bisa membuktikan ke publik bahwa proses penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih. KPK tegak lurus saja, kemudian buktikan pada masyarakat bahwa mereka bisa tajam ke atas,



H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Dapil Nangroe Aceh Darussalam II



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

Habib Aboe: Langkah Kapolri Baru Silaturahmi ke Ormas Islam terbesar di Indonesia Sangat Tepat



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Silaturahmi ke dua lembaga tersebut, adalah bagian dari upaya mendengarkan aspirasi masyarakat melalui kanal organisasi kemasyarakatan. Tentunya melalui silaturahmi yang demikian, Kapolri terpilih akan dapat menjelaskan rencana kerja Polri di bawah kepemimpinan beliau. Apa saja program strategis yang akan dilakukan Polri ke depan akan dapat dijelaskan dengan baik,"

Habib Aboe: Langkah Kapolri Baru Silaturahmi ke Ormas Islam terbesar di Indonesia **Sangat Tepat**

KUTIPAN

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang mulai berkunjung ke Ormas Islam terbesar di Indonesia.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, langkah awal Kapolri yang baru dengan bersilaturahmi ke PB NU dan PP Muhammadiyah sangat tepat.

"Hal ini menunjukkan Kapolri memahami dengan baik kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. NU dan Muhammadiyah adalah dua ormas terbesar di Indonesia yang juga merupakan representasi masyarakat," ungkap Habib Aboe.

Silaturahmi ke dua lembaga tersebut, lanjut Habib Aboe, adalah bagian dari upaya mendengarkan aspirasi masyarakat melalui kanal organisasi kemasyarakatan.

"Tentunya melalui silaturahmi yang demikian, Kapolri

terpilih akan dapat menjelaskan rencana kerja Polri di bawah kepemimpinan beliau. Apa saja program strategis yang akan dilakukan Polri ke depan akan dapat dijelaskan dengan baik," papar Sekjen DPP PKS ini.

Disisi lain, imbuhnya, Kapolri juga dapat mengklarifikasi atau memberikan penjelasan jika ada programnya yang masih belum dipahami oleh masyarakat.

"Misalkan saja soal Pam Swakarsa, hal ini panyak menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Melalui forum silaturahmi Kapolri dapat memberikan penjelasan konsep PAM swakarsa yang beliau maksud, jika tak salah ini

berbeda dengan yang di tahun 1998," ungkapnya.

Tentunya selain itu semua, kata Aboe, Polri bisa bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah dalam banyak hal, seperti pembinaan mental anggota, pendidikan, kegiatan sosial hingga kesehatan.

"Harapan saya, apa yang dilakukan Kapolri ini akan semakin mendekatkan Polri kepada Rakyat dan akan semakin mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.



Harapan saya, apa yang dilakukan Kapolri ini akan semakin mendekatkan Polri kepada Rakyat dan akan semakin mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya

**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

Anggota FPKS **Pertanyakan** Sejumlah Program 'Siluman' KKP Selama 2020

KUTIPAN

Jakarta (27/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet, menyoroiti sektor perikanan Indonesia yang dinilai belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional

Padahal, kata Slamet, sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan, seperti dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi.

"Tidak hanya bagi masyarakat di sekitar lingkungan sumber daya, namun juga meliputi suatu kawasan atau komunitas tertentu," ungkapnya.

Slamet mengatakan, Menurut Bappenas (2014), sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sektor perikanan juga memberikan dampak penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi sebagai penggerak utama (prime mover)

ekonomi nasional.

"Penjelasan tersebut, setidaknya didasari pada empat kenyataan. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan besar, baik secara kuantitas maupun diversitas," ungkapnya. Kedua, imbuhnya, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya.

"Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan terakhir Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang dimiliki," sebut Slamet.

"Namun meskipun sektor perikanan memiliki potensi yang

begitu besar seperti yang telah diuraikan di atas, kenyataannya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional masih sangat kecil, begitupun juga dengan kondisi nelayan Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan," imbu Slamet kepada media, Rabu (27/01).

Slamet menuturkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah memasuki masa peralihan kepemimpinan yang seharusnya menjadi momentum perbaikan untuk memenuhi target-target yang sudah dicanangkan sebelumnya.

"Oleh karena itu, Fraksi PKS sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional yang dimiliki oleh DPR meminta penjelasan beberapa hal," terangnya.

Terkait penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, sambung Slamet, secara umum pihaknya mengapresiasi serapan anggaran KKP yang mencapai 91,27 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun dari pagu Rp 5,2 triliun yang ditetapkan tahun 2020.

Namun, imbuhnya, ada catatan khusus untuk



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Sektor perikanan Indonesia belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional. Padahal sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan, seperti dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi."

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang serapan anggarannya di bawah 90 persen atau tepatnya 85,51 persen untuk Perikanan Tangkap dan hanya 80,21 persen untuk Perikanan Budidaya.

"Tentu saja rendahnya

serapan ini sangat mengecewakan, sebab kedua sub sektor tersebut adalah andalan dari KKP yang program-programnya dinantikan oleh masyarakat," tegas Slamet.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg FPKS: Pemotongan Anggaran KLHK, Bukti Pemerintah Tak Peka dengan Kerusakan Hutan

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, Pemerintah kehilangan kepekaan atas kondisi saat ini.

Johan menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya lagi sakit, tapi juga sedang dilanda banyak bencana.

"Pemotongan anggaran belanja KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun anggaran 2021 sebesar Rp 519.378.525.000,00 merupakan bukti pemerintah tidak sensitive terhadap kondisi hutan Indonesia yang semakin turun dan seharusnya diperlukan komitmen pemerintah untuk menjaga kawasan hutan agar kehidupan kita terhindar dari banyak bencana akibat ulah kita sendiri", ujar Johan saat melakukan Rapat Kerja (raker) dengan Menteri LHK beserta jajarannya pada, Senin (01/02) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Politisi PKS ini menyatakan

bahwa pemotongan anggaran KLHK secara sepihak oleh Kementerian Keuangan adalah bukti kebijakan yang tidak pro lingkungan.

"Rp 500 miliar lebih yang dipotong tersebut diambil dari 67% anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan," ungkapnya.

Padahal, imbuhnya, Pemerintah pusat sepenuhnya yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka menjaga kecukupan kawasan hutan.

"Saya menyesalkan pernyataan Pemerintah bahwa bencana banjir dan tanah longsor hanya disebabkan oleh faktor curah hujan dan perubahan iklim," pungkask Legislator asal NTB ini.

Padahal, menurut Johan, timbulnya bencana banjir dan longsor lebih dominan disebabkan adanya perilaku eksploitasi yang mengganggu keseimbangan ekosistem alam sehingga lingkungan alam berubah total, dan juga akibat banyaknya kerusakan sungai-sungai.

"Menurunnya permukaan tanah setiap tahun serta laju deforestasi atau kerusakan hutan yang terus meningkat setiap tahun", papar Johan.

Selanjutnya Johan meminta Menteri LHK untuk segera menindaklanjuti hasil raker sebelumnya yang menugaskan KLHK Menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung DAS (daerah aliran sungai) dan hutan lindung serta pembelaan masyarakat di Kawasan hutan.

"Saya minta KLHK untuk selalu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan rehabilitasi DAS dan pelaksanaan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajibannya yang harus dilakukannya, jika tidak maka harus segera dilakukan pencabutan



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta KLHK untuk selalu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan rehabilitasi DAS dan pelaksanaan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan, jika tidak maka harus segera dilakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan tersebut"

izin usaha bagi perusahaan tersebut," tegas Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini meminta, agar KLHK selalu berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir

dan longsor dengan cara menghentikan perubahan peruntukan Kawasan hutan serta berupaya menghentikan pemberian izin penggunaan Kawasan di wilayah DAS.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota FPKS Nilai APBN Belum Sejahterakan Peternak

KUTIPAN

Jakarta (28/01) ---
Anggota Komisi IV
DPR RI dari Fraksi
PKS, Hermanto
menyebut-kan,

Di bulan Desember 2020
Peternakan hanya 98,72.
Sementara, Anggaran Direktorat
Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
tahun 2020 sebesar Rp
1.153.013.024.000

"Ini berarti sepanjang
tahun 2020 para peternak terus
mengalami kerugian. Ini tidak
sebanding dengan besarnya
anggaran yang dikeluarkan
Negara, yang salah satu nya
bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan peternak," papar
Hermanto.

Nilai ekspor peternakan,
lanjutnya, merupakan sub
sektor tertinggi kedua setelah
perkebunan yaitu 6%. "Namun
demikian, hal ini juga tidak
serta merta menaikkan NTP
Peternakan," ucap legislator

FPKS ini.

Belakangan ini terjadi
mogok pedagang daging sapi di
sebabkan harga yang tinggi.

"Anehnya, kenaikan harga
daging sapi ini juga tidak
meningkatkan kesejahteraan
peternak," ucapnya.

Atas fakta tersebut, kata
Hermanto, Fraksi PKS DPR
mendesak Kementerian
Pertanian agar melakukan
evaluasi kegiatan Ditjen PKH
tahun 2020 dan memperbaiki
jenis kegiatan tahun 2021 yang
berbasis peningkatan
kesejahteraan peternak.

"Ditjen PKH jangan hanya
mengejar target realisasi
anggaran, tapi kesejahteraan
peternak terabaikan,"
tandasnya.

Kementerian Pertanian,
tambahnya, jangan hanya
menggenjot ekspor dengan
program Gratiexs (gerakan tiga
kali ekspor).

"Lakukan juga
pengendalian impor produk
pertanian," pungkas legislator
dari Dapil Sumbar I ini.

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI



Ditjen PKH jangan hanya mengejar target realisasi
anggaran, tapi kesejahteraan peternak terabaikan,
Kementerian Pertanian, jangan hanya menggenjot ekspor
dengan program Gratiexs (gerakan tiga kali ekspor).
Lakukan juga pengendalian impor produk pertanian

Anggota FPKS Soroti Besarnya Pemotongan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Vaksin

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan,

pada kebijakan refocusing anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, yang 67 persennya terjadi pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan.

Akmal menilai, dari Rp. 519 Miliar pemotongan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang direncanakan untuk keperluan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional dan penanganan pandemi Covid-19, namun proporsinya terlalu besar pada program pengelolaan hutan berkelanjutan yang dipotong sebesar Rp. 349 Miliar.

"Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-

30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran untuk penanggulangan covid-19. Namun sebaran pemotongan program kan mestinya tiap kementerian memiliki kebijakan proporsinya. Mestinya KLHK jangan terlalu Mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan ini", urai Akmal.

Akmal pada rapat kerja DPR RI Komisi IV dan Kementerian KLHK, mempertanyakan dasar KLHK memotong alokasi program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga lebih Rp. 300 Miliar.

Akmal mewakili FPKS

menyayangkan, program yang di potong adalah terkait dengan hutan berkelanjutan. Padahal program ini seharusnya menjadi program unggulan KLHK, ditengah rusaknya ekosistem dan ketidakpastian pengelolaan sumber daya hutan.

"Refocussing terhadap anggaran KLHK cukup besar bila dibandingkan dengan mitra komisi IV lainnya seperti KKP yaitu sebesar Rp.150 Miliar. Dan pemotongan program Pengelolaan hutan lebih besar dari pemotongan satu kementerian di KKP", keluh Akmal.

Politisi PKS ini menjelaskan, tidak kurang dari 23 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017. Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan pulau Jawa tersisa 1 juta hektar hutannya.

Anggota Komisi IV di DPR ini mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya Meminta perlu dipertimbangan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpoluh tahun ini."

secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena Bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.

"Saya Meminta perlu dipertimbangan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpoluh tahun ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Tarif Kerap Naik, Politisi PKS Tegur Badan Pengatur Jalan Tol

99 KUTIPAN

"SPM tol ini payah. Saya dan beberapa teman di komisi V pernah hampir mengalami kecelakaan karena ada genangan air di tol atau jalan tol yang berlubang. Jalan tol belum setahun dibangun sudah bongkar-bongkar karena rusak. Apa sekarang ada pekerjaan baru melubangi jalan tol ? Rasanya sangat tidak layak baru setahun dibangun jalan sudah berlubang

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Tarif yang Kerap Naik, Politisi PKS Tegur Badan Pengatur Jalan Tol

KUTIPAN

Kenaikan tarif tol kerap menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah sopir bus dan truk yang menggunakan ruas jalan tol mengaku kenaikan tarif tol yang dilakukan secara periodik, terlebih disaat pandemi sangat membebani karena penghasilan mereka berkurang.

Jakarta (27/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, menegur keras Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait tarif tol yang selalu naik sehingga membebani masyarakat.

Hal itu disampaikan Sigit Sosiantomo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Selasa (27/01/2021).

"Saya sudah bilang berkali-kali kepada BPJT bahkan ke Menteri PUPR agar tidak menaikkan tarif tol. Jangan dong selalu dinaikan, apalagi naiknya bisa sampai 100% dari Rp 4.500 menjadi Rp9.000. Ini membebani rakyat dan menye-

babkan naiknya biaya logistik." kata Sigit yang juga mantan Wakil Ketua Komisi V itu.

Dalam RDP tersebut, Sigit juga mengkritik kondisi jalan tol yang tidak memenuhi SPM. Kondisi jalan tol yang tidak laik tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan angka kecelakaan.

Sigit dan sejumlah anggota komisi V mengaku pernah hampir mengalami kecelakaan di jalan tol karena kondisi jalan tol yang tidak laik.

"SPM tol ini payah. Saya dan beberapa teman di komisi V pernah hampir mengalami kecelakaan karena ada genangan air di tol atau jalan tol yang berlubang. Jalan tol belum setahun dibangun sudah

bongkar-bongkar karena rusak. Apa sekarang ada pekerjaan baru melubangi jalan tol? Rasanya sangat tidak layak baru setahun dibangun jalan sudah berlubang," kata Sigit.

Seperti diketahui, kenaikan tarif tol kerap menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah sopir bus dan truk yang menggunakan ruas jalan tol mengaku kenaikan tarif tol yang dilakukan secara periodik, terlebih disaat pandemi sangat membebani karena penghasilan mereka berkurang.

Penyesuaian tarif tol yang dilakukan atas usulan dari BPJT juga dinilai terlalu tinggi sementara kewajiban SPM jalan tol juga tidak dipenuhi.

Untuk itu, Sigit meminta BPJT dan Kementerian PUPR tidak asal menaikkan tarif, khususnya untuk kendaraan logistik.

"Jika memang terpaksa naik, tolong tarif untuk kendaraan umum penumpang dan kendaraan logistik tidak naik atau batalkan kenaikannya. Saat pandemi seperti ini, akan semakin membebani rakyat dan biaya logistik jadi tinggi," kata Sigit.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

"Saya sudah bilang berkali-kali kepada BPJT bahkan ke Menteri PUPR agar tidak menaikkan tarif tol. Jangan dong selalu dinaikan, apalagi naiknya bisa sampai 100% dari Rp 4.500 menjadi Rp9.000. Ini membebani rakyat dan menyebabkan naiknya biaya logistik."

Legislator PKS Minta Kementerian PUPR Gandeng Baznas Salurkan Bantuan Perumahan

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Bantuan perumahan untuk masyarakat kurang mampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirasa akan makin tepat sasaran ketika PUPR menggandeng banyak lembaga dalam penyelenggaraan program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi Maazat selaku Anggota DPR RI Dapil Riau 2 dari Fraksi PKS, saat melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan program kerja tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Infrastruktur yang dilaksanakan di Senayan pada Senin (01/02).

"Di setiap daerah ada namanya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Ini kalau bisa kita ajak kerjasama. Saya akan mengajak Baznas Kabupaten/Kota bertemu dengan Kepala Balai. Nanti kita inventarisir masyarakat yang

tidak menyediakan dana swadaya, maka Baznas dapat membantunya" kata Syahrul Aidi di depan peserta rapat.

Sebagaimana diketahui, salah satu program Dirjen Perumahan yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Pada bantuan ini, penyelenggara program meminta kepada masyarakat penerima menyediakan sejumlah dukungan anggaran secara swadaya.

Syahrul Aidi menemukan fakta di lapangan banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak mampu

menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.

"Masyarakat kurang mampu itu ada sebagian yang dapat menyediakan sejumlah anggaran secara swadaya untuk menguatkan program tersebut. Namun banyak juga yang tidak mampu. Namanya saja masyarakat kurang mampu, jangankan untuk itu, untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak mereka tidak mampu. Nah, untuk masyarakat dengan kategori ini Dirjen Perumahan dapat menggandeng Baznas setiap daerah. Nanti Baznas akan mengkaji masyarakat mana saja yang layak mereka bantu." kata Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi juga tidak menampik bahwa agama selain Islam juga akan memiliki lembaga sejenis untuk mengumpulkan dana umat untuk kepentingan umat.

"Dan itu tidak mesti Baznas saja yang digandeng. Dari agama lain, atau institusi lain juga dapat digandeng. Terpenting masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi merasakan

**H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI

Di setiap daerah ada namanya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Ini kalau bisa kita ajak kerjasama. Saya akan mengajak Baznas Kabupaten/Kota bertemu dengan Kepala Balai. Nanti kita inventarisir masyarakat yang tidak menyediakan dana swadaya, maka Baznas dapat membantunya

kehadiran program ini. Jangan sampai yang lebih berhak menerima bantuan tidak mendapatkannya" kata alumni Al Azhar Mesir ini.

Syahrul Aidi juga menambahkan bahwa kolaborasi antar institusi

pemerintahan harus terus diperkuat.

"Tidak mungkin satu institusi akan bekerja sendiri. Mereka akan tetap membutuhkan dukungan dari institusi lainnya," tegas Syahrul.

Politisi PKS Minta Pemerintah Jujur Terkait Stok Pangan

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah menggunakan basis data akurat terkait proyeksi ketersediaan pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Amin mengingatkan tantangan dalam mengelola stabilitas harga pangan saat ini bakal muncul baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

"Dari sisi pasokan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus bisa memastikan ketersediaan kebutuhan pangan apa saja yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga dapat segera dipenuhi melalui pengadaan impor," ungkapnya.

Kondisi pandemi, imbuhnya, yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir maupun tingginya peristiwa bencana alam di berbagai daerah, sangat mungkin mengganggu ketersediaan maupun pasokan pangan.

"Perubahan iklim dan bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi, bisa menyebabkan kegagalan panen

sejumlah komoditas pangan. Kemendag dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah harus segera menyinkronkan data proyeksi stok pangan pasca bencana," ujar Amin.

Bencana hidrometeorologi terutama banjir dan longsor akan menimbulkan gangguan distribusi logistik pangan antar daerah maupun antar pulau. Terlebih adanya ketimpangan kondisi ketahanan pangan antara Pulau Jawa dengan wilayah-wilayah di Indonesia Timur termasuk di Pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.

"Di sisi lain permintaan, datangnya bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, berpotensi meningkatkan permintaan terutama pada komoditas tertentu sehingga berdampak pada tingginya inflasi," pungkasnya. Mengutip laporan Badan

Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, inflasi berkejolak yang didominasi kelompok pangan pada tahun kalender 2020 mencapai 3,62 persen. Komponen bahan makanan pun memperlihatkan inflasi sebesar 3,48 persen.

Namun demikian, Amin mengingatkan pemerintah agar tidak ugal-ugalan dalam importasi kebutuhan pangan. Selain merugikan petani, kasus membusuknya 20 ribu ton beras di gudang bulog pada Desember 2019 menunjukkan koordinasi pengelolaan stok pangan yang ambruk.

"Ibarat dua sisi mata uang, jaminan ketersediaan stok diperlukan agar stabilitas harga terkendali sehingga inflasi pun terkendali. Namun jangan sampai impor merugikan petani pelaku usaha sektor pangan di dalam negeri," tegasnya.

Volatilitas harga pangan, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang, harus bisa diantisipasi dengan baik. Data pergerakan harga beras misalnya, diperlukan mekanisme pantauan yang cepat agar tidak terjadi lonjakan permintaan akibat panic buying. Selanjutnya volatilitas



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

“Perubahan iklim dan bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi, bisa menyebabkan kegagalan panen sejumlah komoditas pangan. Kemendag dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah harus segera menyinkronkan data proyeksi stok pangan pasca bencana”

harga kedelai juga harus diselesaikan, karena tren rebutan pasokan di pasar global akibat naiknya permintaan China secara signifikan masih akan berlangsung. Amin kembali mendesak Kemendag

melakukan pendekatan ke negara-negara produsen untuk mengamankan pasokan setahun ke depan. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Minta **Pembayaran Pesangon** Karyawan Merpati Nusantara Airlines Cepat Diselesaikan

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI dengan Perhimpunan Purnabakti Merpati Nusantara Airlines dan Tim Dobrak Merpati

pada Selasa (02/02/2021) akan meminta kepada kementerian BUMN dan PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset) agar dapat membantu secara cepat persoalan yang sudah berlarut-larut ini.

Nevi sangat menyayangkan atas musibah bangkrutnya Merpati Nusantara Airlines (MNA). Perusahaan penerbangan plat merah ini stop beroperasi sejak 2014, dan dinyatakan bangkrut karena terliilit utang Rp.7,4 triliun.

"Saya mencatat, utang perusahaan MNA untuk pesangon 1.233 karyawan yang kena PHK sejak April 2016 masih banyak sekali yang belum tuntas. Tercatat masih

ada Tunggakan Rp.318,17 miliar untuk pembayaran kedua pesangon kepada bekas karyawan-karyawan perusahaan MNA ini", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini akan membawa dialog ini kepada kementerian BUMN dan juga PT PPA dengan tujuan mendorong pihak yang memiliki kemampuan dan ada hubungan dengan tanggung jawab ini agar terjadi penyelesaian yang baik dan semua dapat tertunaikan hak dan kewajibannya.

"Saya sangat menyesalkan atas berlarutnya persoalan ini meskipun Sudah berulang kali Tim Dobrak Merpati melakukan audiensi, namun persoalan

belum juga selesai hingga hari ini. Padahal, dialog-dialog penyelesaian Sudah dilakukan kepada Kementerian BUMN, Ombudsman, dan DPR-RI periode-periode sebelumnya," papar Nevi.

Dari laporan yang diterima Anggota Komisi VI ini di antaranya, Sejak awal pencairan pesangon terhadap 1.233 karyawan tersebut sudah tak berjalan mulus. Dari hak 100%, PT MNA baru memberikan pesangon 50%. Pencairan pesangon yang sudah dipotong itu pun dicicil dua kali. Pada tahun 2018, PT MNA baru melakukan satu kali cicilan. Sementara cicilan keduanya tak terlunasi hingga sekarang.

"Laporan yang kami terima, alumni Karyawan Merpati mengeluh karena tidak mendapat penghasilan lagi sehingga kehidupannya sangat sulit. Bahkan ada yang tidak bisa bayar sekolah anak. Ini sangat ironi dan menyedihkan", keluh Nevi.

Nevi melalui Fraksinya, akan mendesak kementerian BUMN agar memiliki niat baik untuk segera menyelesaikan



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

“Fraksi kami, akan memperjuangkan agar pembayaran pesangon karyawan MNA ini dapat diselesaikan, untuk menunaikan hak mereka. Kami berharap, PMN dapat dikucurkan dengan skema strukturalisasi yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku”

persoalan mantan karyawan Merpati.

Dari informasi yang dikumpulkan, pemerintah sudah pernah menyuntik Merpati dengan penyertaan modal pemerintah (PMN) pada rentang 2015-2016. Dana PMN ini digunakan untuk

membayarkan sebagian pesangon karyawan, dan sebagian lainnya untuk membantu perusahaan melakukan restrukturisasi melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



*Gambar diambil sebelum Pandemi

SELAMAT HARI PERS NASIONAL

09 Februari 2021

Pers yang Sehat
Pilar Kokohnya Demokrasi

Politisi PKS Minta Pemerintah Tegas terhadap Perusahaan yang Tidak Lakukan Reklamasi Bekas Galian Tambang

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah meningkatkan kinerja reklamasi bekas galian tambang agar tidak membahayakan lingkungan.

Mulyanto meminta Pemerintah tegas laksanakan aturan UU Minerba soal reklamasi pasca tambang dan tidak membiarkan lubang-lubang tambang tetap menganga. Jika perlu, kata Mulyanto, Pemerintah mempidanakan perusahaan tambang yang ingkar memenuhi kewajibannya.

"Pemerintah jangan membiarkan lubang-lubang besar terus menganga-naga sehingga menimbulkan bahaya dan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagaimana ditengarai para ahli, lubang ini juga dapat mengakibatkan banjir seperti di Kalimantan Selatan," kata Mulyanto.

Untuk itu, lanjut Mulyanto,

Pemerintah perlu memperkuat aspek penegakan hukum reklamasi lubang tambang ini. Apalagi dana reklamasi tambang dan sanksi pidana bagi pelanggarnya sudah ada dan jelas diatur dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

Pengaturan sanksi pidana penjara lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar bagi pihak

yang tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.

Mantan anggota Panitia Kerja RUU Minerba ini setuju dan mendukung pasal yang menguatkan sanksi bagi para pelanggar reklamasi dan/atau pasca tambang dari aturan sebelumnya yang hanya mengenakan sanksi administratif.

"Dengan revisi UU No. 3/2020 tentang Minerba, yang baru berusia seumur jagung ini, kita mendorong aspek pengelolaan lingkungan tambang, baik reklamasi dan/atau pascatambang menjadi semakin baik. Karenanya, yang dibutuhkan sekarang adalah aspek law enforcement-nya. Apa artinya revisi UU Minerba tersebut kalau aspek penegakan hukumnya tetap tidak berubah," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Berdasarkan data



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Dengan revisi UU No. 3/2020 tentang Minerba, yang baru berusia seumur jagung ini, kita mendorong aspek pengelolaan lingkungan tambang, baik reklamasi dan/atau pascatambang menjadi semakin baik. Karenanya, yang dibutuhkan sekarang adalah aspek law enforcement-nya.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi reklamasi pada 2020 mencapai 9.694 Hektar (Ha) atau meningkat dari realisasi tahun 2019 yang tercatat sebesar 7.626 Ha. Sementara target reklamasi untuk 2021 sebesar 7.025 Ha.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dukung Pembentukan IBH, Aleg PKS: Berikan Perhatian Besar pada Riset dan Inovasi

KUTIPAN

Jakarta (1/02) — Anggota Komisi 7 DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menegaskan dukungannya terhadap pembentukan IBH (Indonesia Battery Holding),

ia mendesak agar proyek tersebut dikelola secara profesional karena memiliki anggaran yang sangat besar.

“Saya dan Fraksi PKS sangat mendukung pembentukan IBH, dan karena proyek ini punya anggaran yang sangat besar maka kami mendesak proyek tersebut dikelola dengan profesional. Apakah IBH ini sudah terbentuk secara resmi? Dan apa yang sudah dikerjakan sekarang?”, ucap Rofik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR RI dengan Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional dll, Senin (1/02).

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VII ini meminta perkembangan surat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan

perusahaan-perusahaan yang terlibat terkait dengan rencana pengembangan baterai tenaga listrik di Indonesia.

“Kami meminta update MoU dengan LG dan CATL (China’s Contemporary Amperex Technology), soal rencana pengembangan baterai tenaga listrik di Indonesia. Kami berharap dengan biaya yang sangat besar ini IBH dan Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membentuk mitra joint venture,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rofik turut mempertanyakan keterlibatan PT LEN Industri (Persero) dalam IBH serta mendorong ketua tim proyek pembentukan IBH agar memberikan perhatian pada riset dan inovasi.

“Kami juga meminta jawaban terkait dengan apakah

PT LEN secara otomatis dilibatkan dalam IBH dan perannya apa di IBH. Kami meminta ketua tim proyek ini untuk memberikan perhatian besar yang terkait pada riset dan inovasi,” ungkap Rofik.

Ia juga meminta agar proyek pembentukan IBH tersebut dijadikan prioritas dengan diberikan stimulus agar dapat berjalan sesuai dengan target.

“Harus dijadikan prioritas utama termasuk juga pemberian stimulus agar bisa berjalan dengan lancar sesuai target yang ditetapkan,” tutup Rofik.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

“Kami meminta update MoU dengan LG dan CATL (China’s Contemporary Amperex Technology), soal rencana pengembangan baterai tenaga listrik di Indonesia. Kami berharap dengan biaya yang sangat besar ini IBH dan Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membentuk mitra joint venture.”



Soal Rencana Penampungan Dana Umrah

HNW: Dana Besar Harus Diawasi dan Dikritisi

KUTIPAN

Jakarta (28/01) — Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi langkah Kementerian Agama yang berencana menerapkan kebijakan penampungan dana umrah dalam rangka menjaga keamanan dana jamaah.

Karenanya HNW meminta Kementerian Agama mengkaji lebih dalam dengan mempertimbangkan berbagai masalah yang bisa terjadi, serta masukan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebelum mengesahkan Peraturan Pemerintah tersebut. Pasalnya, potensi dana yang tertampung cukup besar. Jika jamaah umrah mencapai 1 juta setiap tahun dengan biaya rata-rata Rp 20 juta, maka ada potensi penampungan dana senilai Rp 20 Triliun.

"Saya memahami bahwa diperlukan solusi atas penyelenggara umrah wanprestasi yang merugikan jamaah, namun penampungan dengan potensi dana besar juga rawan menimbulkan masalah seperti penyal-

ahgunaan anggaran, korupsi dll, yang akhirnya bisa merugikan calon jamaah Umrah, penyelenggaraan Umrah, dan mencoreng nama Kemenag. Oleh karena itu Kemenag harus transparan, dan seluruh pihak khususnya Komisi VIII DPR-RI dan PPIU harus dilibatkan dalam mempersiapkan dan mengawal kebijakan baru ini", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (28/01).

Anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama ini mencatat ada beberapa hal positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Positifnya adalah akan ada tenggat waktu maksimal keberangkatan dan perlindungan dari penelantaran atau kegagalan keberangkatan.

"Namun, peningkatan cakupan asuransi kemungkinan akan meningkatkan nilai premi, sehingga otomatis meningkatkan biaya penyelenggaraan umrah. Jika umrah mahal dan pelaksanaan hukum terkait legalitas PPIU masih lemah, sangat mungkin muncul penyelenggara-penyelenggara perjalanan umrah yang bodong, yang menjanjikan harga murah sehingga membuat banyak jamaah kembali tertipu," papar HNW.

Selain itu, imbuhnya, sekolompok dana sudah dipusatkan ke penampungan, belum ada jaminan atas dana tersebut apabila terjadi wan prestasi.

Untuk itu saya mengusulkan agar penampungan dana umrah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana dana haji," pungkasnya.

HNW sapaan akrabnya mengingatkan, kebijakan penampungan dana umrah tak menyelesaikan masalah penyelenggara umrah yang tak berizin.

"Oleh karena itu, Kementerian Agama tetap harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum atas penyelenggara umrah bodong. Dirinya juga menghimbau agar jangan sampai mekanisme



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kementerian Agama tetap harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum atas penyelenggara umrah bodong. Dirinya juga menghimbau agar jangan sampai mekanisme penampungan dana umrah menyulitkan PPIU dalam mengambil dana tersebut untuk keperluan penyiapan akomodasi terkait penyelenggaraan umrah"

penampungan dana umrah menyulitkan PPIU dalam mengambil dana tersebut untuk keperluan penyiapan akomodasi terkait penyelenggaraan umrah," ujar HNW.

Sebab, kata HNW, berkaca dari sistem sebelumnya yakni

Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), uang jamaah sering tertahan dan pecairannya membutuhkan waktu, sehingga berdampak negatif.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dalam raker di DPR bersama
Menkes, kritik Wakil Ketua Komisi IX
dari FPKS Anshori Siregar,
"Batalkan Pemotongan Insentif
Tenaga Kesehatan", disepakati
menjadi **KEPUTUSAN**

BATALKAN PEMANGKASAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Nakes itu sudah merelakan
nyawanya semuanya untuk
kehatan kita semua. Rela
dikurangi insentifnya itu? Dimana
otaknya ini, kita harus sama-sama
disini ini pak. Tolong jangan
dikurangi itu insentif mereka



H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua Komisi IX Peringatkan Pemerintah Jangan Ada Pemangkasan Insentif Tenaga Kesehatan

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Anshori Siregar menyatakan pemangkasan insentif tenaga kesehatan sebesar 50% dirasa kurang tepat.

Hal ini disampaikan Anshori Siregar dalam rapat kerja komisi IX bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset dan Teknologi pada Rabu (03/02) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Senayan, Jakarta.

"Batalan pemangkasan insentif tenaga kesehatan. Jangan sampai ada pemangkasan insentif tenaga kesehatan di seluruh Indonesia," ungkap Anshori Siregar yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Pemangkasan insentif tenaga kesehatan ini dinilai menyakitkan para tenaga kesehatan yang telah bekerja keras menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan penanggulangan wabah covid-19.

Anshori juga menghimbau

kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan jangan sampai ada pemangkasan insentif terhadap tenaga kesehatan.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau saja berita pemangkasan insentif ini muncul di awal, tentu penanganan wabah Pandemi covid 19 ini bermasalah dan amburadul," kata Anshori.

Terlebih lagi para tenaga kesehatan ini telah mengorbankan jiwa dan raga mereka, tanpa kenal lelah dan waktu di lapangan.

Legislator PKS itu menilai informasi tentang pemangkasan dana insentif membuat para nakes kecewa.

"Kami menghimbau kepada menteri kesehatan dan

menteri keuangan jangan sampai ada pemangkasan insentif tersebut," pinta Anshori.

Sebelumnya Komisi IX DPR melayangkan protes kepada pemerintah merespons pemotongan dana insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Forum itu dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Riset dan Teknologi RI/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Subandrio, dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono.

Diketahui, dalam salah satu kesimpulan rapat kerja itu, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes RI berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk tidak melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan.

Pemangkasan itu tercantum pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 yang menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021



H. ANSORY SIREGAR, Lc.,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Saya tidak bisa membayangkan kalau saja berita pemangkasan insentif ini muncul di awal, tentu penanganan wabah Pandemi covid 19 ini bermasalah dan amburadul"

tanggal 21 Januari 2021.

Surat keputusan itu mengatur tentang Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga

Kesehatan dan Peserta PPDs (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menanggapi Covid-19.

PPKM Tak Efektif, Aleg PKS Minta Pemerintah Kerja Ekstra Cari Terobosan Inovatif

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Pemerintah mengaku kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (COVID-19) tidak efektif.

Indikasinya adalah mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta pemerintah mencari terobosan inovatif guna menekan angka kasus COVID-19.

"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus COVID-19. Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan

sebenarnya," katanya dalam keterangan media, Senin, (01/02).

Salah satu terobosan yang disarankan Netty adalah melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.

"Kebijakan setengah hati antara penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi telah membawa kita pada situasi sulit di mana pandemi tidak terkendali, dan pemulihan ekonomi pun tidak terjadi. Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara benar. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.

Menurut Netty salah satu

bentuk kebijakan setengah hati adalah PSBB dan PPKM.

"PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus. Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik. Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes. Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," lanjut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.

Netty menunjukkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih.

"Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi, pemerintah bukan hanya



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Kita perlu belajar dari India yang jumlah testingnya sangat tinggi. Dengan populasi mencapai 1,3 miliar, India mampu melakukan testing hingga mencapai 197 juta orang, dilanjutkan dengan tracing dan treatment yang benar. Jadi tidak heran kalau angka COVID-19 di sana terus turun"

melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," tambah Netty.

Netty juga menyinggung soal orkestrasi penanganan pandemi COVID-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.

"Untuk menang melawan pandemi COVID-19, kita butuh sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi. Harus dipastikan kebijakan yang diluncurkan itu terukur, efektif, sinkron dan tidak tumpang tindih.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

F-PKS Sukses. Perjuangkan Aspirasi Nakes.

**Tidak jadi ada potongan untuk insentif NAKES.
Untuk mu DOKTER & PERAWAT, perjuangan FPKS!**

Insentif
NAKES
2020

**MENKEU
dipotong
50%**

Perjuangan F-PKS di
Komisi IX dengan
MENKES : Jangan ada
potongan!, kalau bisa
ditambah!

Dirjen anggaran
kemenkeu; tidak jadi
ada pemotongan

**Dokter
Spesialis**

15 Juta



7,5 Juta



15 Juta

**Dokter Umum
& Gigi**

10 Juta



5 Juta



10 Juta

**Bidan
& Perawat**

7,5 Juta



3,75 Juta



7,5 Juta

**Tenaga
Kesehatan
Lainnya**

5 Juta



2,5 Juta



5 Juta

Pelaksanaan Program Literasi Belum Capai Hasil Maksimal

KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa program literasi yang dimulai sejak tahun 2016 belum memberikan hasil yang maksimal.

Dari sisi capaian indeks membaca oleh Perpustakaan RI, program terkait literasi yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerjasama lintas kementerian/lembaga sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.

“Permasalahan literasi yang kami himpun berdasarkan kunjungan kerja Komisi X DPR RI, antara lain masih sulitnya membangun budaya baca di masyarakat, karena budaya tutur masih lebih dominan dibanding budaya baca dan kebiasaan baca sejak dini,” ucap Fikri dalam Rapat Gabungan Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemandes, PDT dan Transmigrasi, Sekjen Kemendagri, Dirjen APTIKA

Kemenkominfo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, dan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Ia mengatakan, pembudayaan membaca menjadi fokus kegiatan bagi pemerintah daerah dengan cara mengajak masyarakat, khususnya anak-anak usia dini untuk mengunjungi perpustakaan. “Dalam hal ini, fasilitasi armada antar jemput yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk layanan antar jemput belum maksimal karena keterbatasan APBD,” ungkapnya.

Fikri menegaskan, Komisi X DPR berkomitmen akan terus mengawal masalah peningkatan literasi di daerah dengan dukungan dari kementerian/lembaga terkait. Politisi Fraksi PKS itu menyampaikan, dalam

kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR tanggal 25 November 2020 disebutkan, Komisi X DPR mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya bersama Perpustakaan untuk mengakselerasi program dan peningkatan literasi Indonesia. Utamanya dalam hal infrastruktur perpustakaan baik fisik maupun IT, ketersediaan buku di daerah 3T, peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan perpustakaan desa.

“Komisi X mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berkolaborasi dan meningkatkan bersama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait program terkait program budaya baca dan peningkatan literasi nasional. Komisi X juga mendorong kementerian/lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fikri sempat menjelaskan mengenai makna dari kata literasi. Dikatakannya, kata literasi secara umum dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun makna literasi kemudian mengalami perluasan seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi,



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

“Pembudayaan membaca menjadi fokus kegiatan bagi pemerintah daerah dengan cara mengajak masyarakat, khususnya anak-anak usia dini untuk mengunjungi perpustakaan. Dalam hal ini, fasilitasi armada antar jemput yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk layanan antar jemput belum maksimal karena keterbatasan APBD”

yakni menjadi keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada dalam bentuk cetak, virtual, digital, maupun audiotori.

Seperti diketahui, gerakan literasi sendiri telah dimulai

pada tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Raker dengan Kemenkeu, Anggota FPKS ini Berikan Sejumlah Catatan

KUTIPAN

Jakarta (28/01) — Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (27/01/2021). Rapat kerja membahas Realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara tahun 2020 (pelaksanaan PEN tahun 2020)

pelaksanaan APBN tahun 2021 dan keberlanjutan PEN tahun 2021, kebijakan cukai hasil tembakau dan kebijakan kluster perpajakan di dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Dalam rapat yang Panjang ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sejumlah catatannya.

Catatan pertama, disampaikan Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini terkait dengan realisasi APBN 2020.

"Saya menyoroti ratio utang terhadap PDB Indonesia (debt to GDP ratio) yang terus mengalami peningkatan dan semakin memburuk akhir-akhir ini. Ketika masa prapandemi, debt to GDP ratio Indonesia terus meningkat, dari awalnya 24% (2014) menjadi 30,2%

(2019). Masa pandemi kemudian melonjak ke 38,5% (2020) dan berpotensi melesat menjadi 40,8% (2021)," papar Anis.

Meningkatnya debt to GDP ratio, imbuhnya, menunjukkan bahwa selama periode tersebut penambahan utang lebih tinggi dibandingkan penambahan PDB. Artinya, utang Pemerintah selama ini belum cukup produktif untuk mendorong PDB nasional.

"Hal ini tentu perlu menjadi catatan penting. Situasi ini merupakan sinyal kurang bagus, yang artinya Pemerintah akan kesulitan mengendalikan laju utang di masa yang akan datang," ujarnya.

Catatan yang kedua disampaikan Anis terkait dengan pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020. Anis mengatakan bahwa

para ekonom sepakat resesi ekonomi akan cepat teratasi jika pandemi bisa dituntaskan dengan cepat.

"Akan tetapi PEN bidang kesehatan tercatat dengan realisasi yang rendah. PEN bidang kesehatan hanya terealisasi Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun," urainya.

Penyebabnya, kata Anis, mulai dari permasalahan administrasi hingga koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah sendiri.

"Seolah kementerian kesehatan tidak dilibatkan dalam penentuan pagu anggaran untuk PEN bidang kesehatan hingga terjadi realisasi anggaran yang lemah dan tidak optimal. Kelelahan juga datang dari berbagai daerah, rumah sakit, dan para tenaga kesehatan terkait anggaran dari pusat yang juga belum jelas," urainya.

Kebijakan Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja dan Kebijakan Cukai Tembakau tidak luput dari hal yang dikritisi.

Anis memaparkan bahwa Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan kenaikan cukai tembakau sebesar 12,5 persen.

"Rencana kenaikan tarif cukai tembakau tergambar



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

"Jika berorientasi pada penghematan anggaran, maka vaksin dalam negeri adalah solusi. Anggaran negara dan devisa pasti terkuras jika orientasinya impor. Dengan jumlah penduduk 268 juta, maka vaksin dalam negeri harus didukung penuh secara anggaran dan diprioritaskan."

pada kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8 persen. Target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun," terang Anis.

Kondisi ini, lanjut Anis,

Merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2020 sebesar Rp170,24 triliun naik 3,1 persen dari target 164,9 triliun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Anggota Baleg DPR FPKS Desak Pemerintah Implementasikan Amanat UU Pangan

KUTIPAN

Pemerintah didesak melaksanakan amanat dan perintah dari isi UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. karena hal ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga amanat UU ini harus dilaksanakan.

Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Adang Daradjatun mendesak pemerintah supaya melaksanakan amanat dan perintah dari isi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasalnya, hal ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga amanat UU ini harus dilaksanakan. Adang menegaskan, jika amanat UU ini

dilaksanakan secara baik, maka subsistem terkait pangan yang tersebar akan menjadi sistem yang kuat.

Saat mengikuti Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/1/2021), Adang mengatakan UU Pangan telah melahirkan sejumlah aturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Namun dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada sejumlah hal yang mengemuka, salah satunya terkait kebijakan pangan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, namun secara aturan PP belum ada. Ia mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kendati ada link yang terputus.

"Kita apresiasi Gubernur Jawa Tengah, karena beliau melakukan terobosan dalam konteks pengamanan pangan. Tapi apapun juga harus dibuatkan payung hukumnya. Untuk itu saya menyampaikan, tolong saya dikirim bahan

tertulis link-link apa yang hilang, sehingga semua terobosan beliau ada payungnya. Sehingga kita tidak saling salahkan antara pemerintah pusat dan daerah, tapi lebih ingin apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang tersebut," kata Adang di Gedung Grhadika Bhakti Praja.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Kita apresiasi Gubernur Jawa Tengah, karena beliau melakukan terobosan dalam konteks pengamanan pangan. Tapi apapun juga harus dibuatkan payung hukumnya. Untuk itu saya menyampaikan, tolong saya dikirim bahan tertulis link-link apa yang hilang, sehingga semua terobosan beliau ada payungnya. Sehingga kita tidak saling salahkan antara pemerintah pusat dan daerah, tapi lebih ingin apa yang dilakukan pemerintah daerah adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang tersebut



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Anggota FPKS Berbagi Benih Udadang dan Ikan kepada Warga Kab. Bone

KUTIPAN

Kabupaten Bone (27/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menjalankan kepeduliannya,

kepada para petani Tambak, khususnya yang berada di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Hal ini dibuktikan, politisi PKS ini yang kerap dengan sapaan AAP ini memberikan bantuan benih udang dan benih ikan konsumsi kepada petani tambak.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada petani tambak di Bone. Ini akan saya lakukan secara bertahap disejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Bone,” kata Anggota DPR RI fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Kata Akmal sebagai salah satu Anggota DPR RI Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Dia pun berjanji akan bekerja keras mensejahterakan para petani dan nelayan kita di Bone melalui program berbasis

kebutuhan.

“Ada yang perlu disiapkan sebagai kunci utama untuk kemajuan Bone. Di daerah ini, perlu pemimpin yang bekerja melayani masyarakat dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak,” sambungnya.

Legislator asal Sulsel II ini menerangkan, bahwa sebelumnya, masih ada sejumlah petani di Kabupaten Bone berkeluh kesah atas kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialaminya. Semua aspirasi ini ia telah bawa di forum kementerian ketika Raker DPR dan forum RDP ketika bertemu direktorat jenderal kementerian terkait.

Banyak keluh kesah dari petani yang dicurahkan dan mereka sampaikan pada acara seminar dalam rangkaian silaturahmi Anggota DPR-RI, DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., MM bersama warga Desa Batu Gading, Kecamatan Mare kab

Bone.

“Setiap tahun petani selalu merasakan kelangkaan pupuk bersubsidi, bahkan kami di Desa Batu Gading ini tidak mendapatkan jatah pupuk jenis SP 36. Anehnya lagi, oleh pengecer kami disodorkan blangko kosong diminta untuk ditanda tangani yang kami tidak tahu persis itu untuk apa,” keluh Ketua Gapoktan Batu Gading Firdaus bersama petani lainnya.

Menanggapi hal ini, Andi Akmal menegaskan kepada petani agar jangan pernah menandatangani blangko yang masih dalam keadaan kosong. Tetapi, ia meminta agar terlebih dahulu warga ataupun petani terlebih dahulu mengetahui isi apa yang ditandatangani.

Terkait dengan masalah kelangkaan pupuk, Andi Akmal telah melakukan inisiasi Forum Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Dirjen Kementan RI, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia, Dinas Pertanian Sulsel dan Dinas Pertanian dan Perkebunan guna membicarakan serta mencari solusi atas masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani di Kabupaten Bone beberapa waktu lalu.

“Kelangkaan pupuk selalu



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

“Minimnya pengawasan menjadi penyebab sehingga petani selalu mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pengawasan harus lebih ditingkatkan, distributor atau pengecer yang nakal agar segera dievaluasi, bahkan kalau perlu diganti atau ditambah daripada merugikan petani

saja terulang, dan kita sudah berupaya memfasilitasi guna mencari solusi. Karena secara teori sedianya tidak ada lagi kelangkaan pupuk, karena stocknya selalu cukup,” tegas Politisi PKS ini.

Menurutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi yang selalu saja terjadi lebih karena minimnya pengawasan dari pemerintah.

Kunjungi Dapil, HNW Serap Aspirasi, **Serahkan Bantuan dan Terima Dukungan** untuk PKS

KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Anggota DPR-RI Dapil Jakarta 2 dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) pada (22/01/2021) lalu.

Anggota DPR asal daerah pemilihan yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri, mengunjung tujuh titik, yakni DPD PKS Jakarta Pusat, PKK DKI Jakarta, LAZ Pertamina dan LAZ PLN beserta Forum Zakat, Masjid Al-Istiqomah Pejabat Barat, Majelis Taklim Bidadari, UMKM Cempaka Putih, dan Tokoh Kelurahan Lenteng Agung.

Dalam kundapil yang sebagiannya secara virtual tersebut, HNW sapaan akrabnya, selain menyerap aspirasi Konstituen, juga menyerahkan berbagai bantuan diantaranya : ambulance untuk DPD Jakarta Pusat, 20 paket APD, masker, dan sarung tangan untuk PKK Rawasari, bantuan UMKM senilai Rp 10 juta di Cempaka Putih, bantuan logistik untuk warga terdampak

Covid-19 di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, bantuan materiil untuk warga korban kebakaran Tebet, dan bantuan untuk seragam komunitas Senam Nusantara.

Warga Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat mengapresiasi kunjungan virtual dan bantuan sosial yang diberikan oleh HNW, juga atas berbagai informasi yang disampaikan HNW terkait kinerjanya laksanakan amanat sebagai Wakil Rakyat di DPR.

Apresiasi dan aspirasi serta dukungan tersebut salah satunya disampaikan oleh Kuswanto, tokoh pemuda Lenteng Agung yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Idaman pimpinan H. Rhoma Irama.

"Saya dengan ketulusan hati mengapresiasi apa yang diperjuangkan PKS selama ini.

Walaupun perolehan kursi hanya 8,6% di DPR-RI, tetapi komitmen untuk melakukan perbaikan sampai saat ini tidak berkurang", ujar Kuswanto dalam pertemuan tokoh masyarakat Lenteng Agung dengan HNW (24/01).

Lebih lanjut, Kuswanto menyatakan bahwa Indonesia butuh partai-partai yang mempunyai idealisme seperti PKS.

Menurutnya, jika partai berpihak kepada kebenaran, maka akan didukung oleh orang-orang yang benar. Hal senada juga disampaikan oleh Jamal, salah satu pengurus RW di Lenteng Agung.

Dalam pandangannya, PKS sangat konsisten dalam memperjuangkan usulan-usulan dari masyarakat. Dia berharap PKS ke depan selalu konsisten membela warga yang membutuhkan bantuan sehingga bisa menjadi jembatan aspirasi warga.

Menanggapi dukungan tersebut, HNW sapaan akrabnya menyampaikan terima kasih dan komitmen PKS untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dirinya mencontohkan,



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Terima kasih atas doa dan dukungan untuk PKS. Sekalipun dengan jumlah sedikit kami berusaha berjuang maksimal, melaksanakan amanat Rakyat dan Umat

sekalipun PKS belum menang Pemilu 2019, komitmen PKS berupa perlindungan tokoh agama dan SIM gratis telah dan terus diperjuangkan.

"Rancangan UU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama telah diselesaikan oleh internal PKS dan saat ini mendapatkan dukungan dari PPP dan PKB," ungkap HNW.

Terkait SIM gratis, imbuhnya, program tersebut malah sudah diadopsi oleh Presiden Jokowi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Tinjau Pergerakan Tanah di Majalengka, Aleg PKS: Perlu Solusi Komprehensif

KUTIPAN

Majalengka (28/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi mengungkapkan kekhawatirannya disela-sela peninjauan langsung ke lokasi bencana tanah gerak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (27/01/2021).

"Kita sudah baca kajian ahli geologi dari kementerian ESDM, Majalengka terutama di daerah selatan punya kontur tanah yang sangat rawan terjadi bencana pergerakan tanah. Hampir 80 % wilayahnya berpotensi mengalami geseran, sangat mengkhawatirkan", ungkapnya.

"Untuk itu, kita ingin meninjau langsung kelapangan dan memastikan sejauh mana kesiapan Pemkab Majalengka dalam mitigasi dan penanganan bencana alam di Kabupaten Majalengka, khususnya bencana pergerakan tanah ini", imbuhnya.

Nurhasan menegaskan bahwa dengan tumbuh pesatnya pembangunan proyek-proyek nasional di Majalengka,

seperti Bandara BJB, Tol Cisumdawu, Aerocity dan lainnya, akan membawa Majalengka menjadi kota besar sehingga diharapkan upaya mitigasi dan antisipasi potensi bencana harus serius tertangani.

"Tentunya persoalan bencana ini sangat kompleks, yang mengerikan adalah pergerakan tanah ini terus menjadi ancaman. Insyaallah pasti ada jalan, yang penting kajiannya harus tuntas, solusinya harus komprehensif dan terintegratif, dan yang terpenting, harus disiplin kajiannya melakukan monitoring evaluasi ketika program tersebut sudah digulirkan, sehingga menjadi gerakan bersama, sadar bencana," jelasnya.

Legislator dari dapil Majalengka ini juga mengungkapkan harapannya agar Perda yang tegas segera dibuat dan semua institusi wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan baik.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus aktif melibatkan pihak swasta, kita sama-sama tau bahwa banyak pabrik-pabrik yang tersebar di majalengka. Nah, kita bisa minta mereka melalui program CSRnya untuk bersama mendukung program penanganan bencana ini", pungkasnya.

Sementara Bupati Majalengka menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana. Karena topografi dataran tinggi pegunungan di wilayah selatan yang rawan bencana alam longsor dan pergerakan tanah serta wilayah utara yang langganan banjir.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan sosial untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Majalengka, sebesar Rp 132.717.795,-



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus aktif melibatkan pihak swasta, kita sama-sama tau bahwa banyak pabrik-pabrik yang tersebar di majalengka. Nah, kita bisa minta mereka melalui program CSRnya untuk bersama mendukung program penanganan bencana ini"

berupa bahan makanan dan alat-alat kebutuhan darurat bagi masyarakat.

Perlu diketahui, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Majalengka, Jawa Barat untuk meninjau lokasi bencana alam longsor akibat pergerakan tanah di Desa Sidamukti, Kecamatan Munjul,

Majalengka, Rabu (27/1/2021).

Rangkaian Kunjungan tersebut diawali dengan pertemuan dengan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, beserta Kementerian Sosial, BNPB dan Dinas terkait di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka.

Profil

- Nama Lengkap
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 30 April 1969
- Dapil
**Jawa Barat I
(Kota Bandung & Cimahi)**

Pendidikan

- **SMA Islam Al Azhar,**
Jakarta Selatan, 1984-1987
- **S1 Jurusan Kimia
FMIPA UI, 1987-1993**
- **S2 Psikologi Sosial
Terapan Psikologi UI,
2000-2002**

Riwayat Organisasi

- **Pramuka, 1982-1989**
- **Himpunan Mahasiswa
Jurusan Kimia FMIPA UI, 1989**
- **Retas Leadership Center, 1994-1996**
- **Indonesian Forum for Parliament on
Population and Development, 2009-2014**
- **Asian Forum for Parliament and
Population and Development, 2009-2014**
- **GOPAC, 2014-2019**

Keluarga

- Suami : **Dr. Bachtiar Sunasto, MS**
- Anak : **4 orang Laki-Laki**

Riwayat Pekerjaan

- **Anggota DPR RI, 2009-2014**
- **Anggota DPR RI, 2014-2019**
- **Anggota DPR RI, 2019-2024**



LEDIA HANIFA

f : Ledia Hanifa Amaliah t : @lediahanifa
i : @ledia_hanifa y : Cerita Ledia g : lediahanifa.com

- **Ketua Dewan Pakar PP Wanita PUI,**
2015-2020
- **Yayasan Uswah Ummahat, 1996-sekarang**
- **Asian Women Parliamentarian Caucus,**
2016-sekarang
- **Anggota Dewan Pakar PP Wanita PUI,**
2020-sekarang
- **Anggota Dewan Pertimbangan
Salimah Pusat, 2020-sekarang**

Kunjungan ke Dapil, Ahmad Syaikhu Berikan Bantuan kepada Satgas Covid-19

KUTIPAN

Karawang (01/02) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu memberikan bantuan kepada Tim Satgas Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Tiga daerah ini merupakan Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII yang menjadi dapil Syaikhu.

Bantuan diberikan kepada Pengurus DPD PKS di tiga kabupaten tersebut saat Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI yang berlangsung dari 29-31 Januari 2021.

"Sebagai orang yang mengalami Positif Covid-19, saya betul-betul merasakan betapa sangat pentingnya pencegahan dan penanganan yang cepat terhadap serangan covid-19," ungkap Presiden PKS ini.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat yang ada. Pertama, harus selalu menjaga kesehatan.

Kedua, tidak boleh lengah

dan menganggap enteng masalah Covid-19. Karena itu harus selalu disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

Ketiga, kepada Pengurus DPD harus fokus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada kader, khususnya yang terkena COVID-19, serta harus membentuk Tim Satgas COVID-19 di setiap DPD.

Keempat, menciptakan ketahanan pangan bagi yang terkena Covid-19.

"Empat hal ini harus dilakukan karena pandemi saat ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir," tegas Syaikhu.

Syaikhu memberikan apresiasi kepada Pengurus DPD PKS yang telah membentuk Tim Satgas Covid-19 sejak awal wabah.

"Alhamdulillah, untuk Satgas Covid-19, setiap DPD sudah membentuknya sejak awal pandemi. Kegiatan untuk mengantisipasi dan mengadvokasi kader dan masyarakat juga telah berjalan baik," kata Syaikhu.

Adapun bantuan yang diberikan antara lain : masker, gloves, hazmat, goggle, sepatu boot, cairan disinfektan, vitamin dan uang untuk operasional Tim Satgas.

"Saya berharap ini bermanfaat dan dapat membantu Tim Satgas Covid-19 di DPD yang menjadi dapil saya. Tidak hanya untuk kader tapi juga masyarakat luas," pungkas Syaikhu.



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

“Sebagai orang yang mengalami Positif Covid-19, saya betul-betul merasakan betapa sangat pentingnya pencegahan dan penanganan yang cepat terhadap serangan covid-19”

Kunjungi Dapil di Kota Tangerang, Mulyanto Resmikan Penerangan Jalan Umum

KUTIPAN

"Alhamdulillah saya diminta Kementerian untuk membagikan ratusan lampu PJU di Tangerang Raya yang menjadi Dapil dan konstituen saya. Dan langsung saya berikan sesuai dengan kebutuhan warga akan kondisi penerangan di wilayahnya"

Tangerang (31/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meresmikan bantuan penerangan jalan umum (PJU) kepada masyarakat di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

Dalam kesempatan sambutannya, Mulyanto menyampaikan harapannya semoga bantuan lampu penerangan jalan umum di wilayah Ciledug bisa bermanfaat bagi warga sekitar.

"Alhamdulillah saya diminta Kementerian untuk membagikan ratusan lampu PJU di Tangerang Raya yang menjadi Dapil dan konstituen saya. Dan langsung saya berikan sesuai dengan kebutuhan warga akan

kondisi penerangan di wilayahnya", ungkap Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR ini menambahkan, yang terpenting bagi setiap upaya kami di PKS adalah memberikan manfaat dan bisa melayani masyarakat.

"Saya bersyukur jika bantuan lampu penerangan jalan umum ini bermanfaat bagi masyarakat. Kalau manfaat paling tidak pahalanya bisa mengalir kepada saya" ungkap Mulyanto.

Selain itu, imbuh Mulyanto, jika warga ada persoalan terkait dengan komisi VII DPR, bisa disampaikan langsung seperti persoalan listrik dengan PLN dan BBM yang langsung berhubungan

dengan masyarakat.

"Silahkan bapak dan ibu sampaikan kepada Fraksi PKS DPR, jika ada kendala atau persoalan insyaAllah kami berkomitmen untuk terus melayani dan berkhidmat untuk masyarakat secara luas", terang Mulyanto.

Terakhir, dalam kesempatan tersebut Mulyanto menyampaikan, informasi pembahasan RUU yang tahun ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 yang sedang dibahas Anggota DPR.

"Diantaranya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas ada RUU BPIP yang nantinya akan mewarnai pembahasan dan pemberitaan di Media. Meski jumlah Anggota Fraksi PKS belum banyak, kami mohon doa bapak dan ibu sekalian agar kami mampu memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat," tutup Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

"Saya bersyukur jika bantuan lampu penerangan jalan umum ini bermanfaat bagi masyarakat. Kalau manfaat paling tidak pahalanya bisa mengalir kepada saya"





*Turut
Berduka
Atas
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

KH. Attabik Ali

Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Pada 6 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Berkunjung ke Dapil, Sakinah Aljufri **Bertemu** Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat

KUTIPAN

Palu (30/01) --
Anggota DPR RI dari
Fraksi PKS, Sakinah
Aljufri berkunjung ke
daerah pemilihan
dan bertemu Pengu-
rus Pusat Wanita
Islam Al-Khairaat
Palu Sulawesi
Tengah Sabtu
(14/11/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Sakinah mengatakan bahwa Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pemahaman dan mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada seluruh masyarakat.

"Sosialisasi kepada seluruh masyarakat, baik itu komunitas, majelis-mejelis taklim, anak-anak SMA, para guru. Semua harus tahu

tentang pentingnya empat pilar kebangsaan," tutur Sakinah.

Sakinah pun mengatakan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak luput dari peran para ulama yang memprakarsai lahirnya Pancasila.

"Apa lagi kita umat Islam pasti pancasilais, karena yang merumuskan Pancasila adalah para ulama. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dahulu diletakkan di alenia ke empat, ulama tidak setuju dan harus diletakkan pada alenia pertama," ungkapnya.

Diakhir pemaparan, Sakinah menyampaikan bahwa sosialisasi empat pilar mampu menjadi sarana penanaman nilai-nilai kebangsaan yang luhur bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sangat penting agar menjadi sarana menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia," tutur Sakinah yang juga menjabat Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairaat.

Sakinah yang merupakan Anggota Komisi X DPR RI ini

memaparkan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika secara terperinci.

Selain dihadiri peserta yang antusias, kegiatan ini diadakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat agar memutus rantai penularan Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak luput dari peran para ulama yang memprakarsai lahirnya Pancasila. Apa lagi kita umat Islam pasti pancasilais, karena yang merumuskan Pancasila adalah para ulama. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dahulu diletakkan di alenia ke empat, ulama tidak setuju dan harus diletakkan pada alenia pertama

Aleg PKS: Pembangunan Pertanian Tidak Bisa Dihentikan

KUTIPAN

Padang (30/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menyebutkan, pembangunan pertanian tidak bisa dihentikan

Hal ini, kata Hermanto, karena manusia, sejak pertama ada di muka bumi sampai menjelang kiamat, perlu makan.

"Populasi manusia terus bertambah. Semuanya perlu pangan. Karena itu perlu ada berbagai upaya untuk melipatgandakan produktivitas hasil pertanian," papar Hermanto dihadapan peserta kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Untuk Petani dan Penyuluh di Solok Selatan, Jumat (29/01/2021) dan di Solok, Sabtu (30/01/2021).

Di Solok Selatan kegiatan diselenggarakan di Gedung Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan. Sementara di Solok, kegiatan diselenggarakan di Gedung Solok Nan Indah Kantor Bupati Solok.

Dalam pemaparannya, Hermanto mengatakan, peningkatan produktivitas

pertanian saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara tradisional.

"Perlu ada sentuhan berbagai teknologi. Agar bisa menggunakan teknologi tersebut maka kapasitas petani dan penyuluh secara periodik perlu ditingkatkan," ucap legislator FPKS ini.

"Kegiatan Bimtek ini merupakan salahsatu cara untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh," tambahnya.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, tenaga kerja sektor pertanian kecenderungannya terus berkurang.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena itu perlu dilakukan upaya menarik minat kaum Milenial agar tertarik terjun ke pertanian," tutur Hermanto.

Kepada para milenial, katanya, perlu diyakinkan bahwa sektor pertanian menjanjikan masa depan yang cerah.

"Karena itu kegiatan ini pesertanya diutamakan kaum milenial dan pembicaranya juga dari kalangan milenial yang telah sukses di bisnis pertanian," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.

Di Solok Selatan, hadir juga Asisten III Setdakab Solok Selatan Amdani, pejabat Balai Pelatihan Pertanian Jambi M. Taufiqurohman, milenial sukses dari Cianjur Sandi Octa Susila dan tokoh muda setempat Effendi Muharram. Di Solok, hadir juga Sandi Octa Susila dan tokoh muda setempat Roi Yurnades.

Kegiatan bimtek untuk petani dan penyuluh di Sumatera Barat dilakukan secara berseri. Sudah dimulai pekan lalu dari Sawahlunto dilanjutkan akhir pekan ini di Solok Selatan dan Solok. Kegiatan rencananya dilanjutkan ke 5 titik berikutnya



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

“Peningkatan produktivitas pertanian saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara tradisional. Perlu ada sentuhan berbagai teknologi. Agar bisa menggunakan teknologi tersebut maka kapasitas petani dan penyuluh secara periodik perlu ditingkatkan



Hadiri Diskusi dengan Petani, Aleg PKS Minta Tanamkan Mindset Business Oriented

KUTIPAN

kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa praktisi seperti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kampar Cokro Aminoto, Kepala Dinas Pertanian dan THP Kampar Bustan dan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar David Hendra.

Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menghadiri undangan kegiatan silaturahmi anggota dan praktisi oleh Poktan Jaringan Sejahtera yang dilaksanakan Kamis (28/01/2021) di Kabupaten Kampar.

Ketua Poktan Jaringan Sejahtera Indra Noval menyampaikan, Kegiatan ini dilakukan para anggota secara rutin untuk mengembangkan ilmu dan akses para anggota.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa praktisi seperti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kampar Cokro Aminoto, Kepala Dinas

Pertanian dan THP Kampar Bustan dan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar David Hendra.

Sebagai pemilik beberapa komoditas pertanian, Syahrul Aidi menyampaikan bahwa bisnis pada sektor pangan saat ini sangat menjanjikan. Adapun yang ditanam oleh petani akan diterima oleh pasar.

"Namun masih disayangkan petani kita masih menjadikan bertani sebagai budaya konsumtif. Kita inginkan mindset konsumtif oriented ini diubah menjadi business oriented. Orientasinya diubah untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari

semakin besar." ujar Syahrul Aidi. Selain itu, Syahrul Aidi juga menjelaskan prospek beberapa komoditas yang unggul saat ini.

Pemikiran business oriented pada petani juga didukung oleh Cokro Aminoto. Bahkan telah disiapkan formula untuk itu yang disebut Optimalisasi Cara Untuk Mandiri Pangan (Ocu Mapan).

"Ocu Mapan ada untuk memperkuat ekonomi keluarga dengan optimalisasi berbagai sektor seperti optimalisasi lahan, optimalisasi SDM, optimalisasi teknologi pertanian, dan lainnya. Dengan mengoptimalkan hal tersebut, diharapkan kita dapat mencapai kemandirian pangan." kata Cokro Aminoto.

Usai diskusi dengan para petani, Syahrul Aidi dan para undangan lainnya melakukan panen perdana cabai milik salah satu anggota Poktan Jaringan Sejahtera. Dilanjutkan peninjauan lahan komoditas pepaya dan calon lahan pendirian mesin giling padi.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Bisnis pada sektor pangan saat ini sangat menjanjikan. Adapun yang ditanam oleh petani akan diterima oleh pasar. Namun masih disayangkan petani kita masih menjadikan bertani sebagai budaya konsumtif. Kita inginkan mindset konsumtif oriented ini diubah menjadi business oriented. Orientasinya diubah untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin besar



Peserta Intershships
Batch II Berkunjung ke Press Room
DPR RI di Komplek Parlemen DPR RI
pada Selasa 02 Februari 2021.



Hadiri pelantikan KPP Sumbar, politisi PKS: Bukti Perjuangan Kesetaraan Gender Dalam Demokrasi

KUTIPAN

“KPPRI hadir untuk menyatakan dan memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam demokrasi”.
Ungkap Nevi

Jakarta, (01/02) — Anggota Legislatif PKS, Nevy Zuairina selaku juga Bendahara KPPRI menegaskan tujuan KPPRI merupakan perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan keadilan gender dalam pemilu demokrasi.

“KPPRI hadir untuk menyatakan dan memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam demokrasi.” Ucap Nevi.

Politisi PKS ini menuturkan bahwa KPPRI bukan sekedar perkumpulan bagi para wanita parlemen, tetapi juga sebagai wadah untuk berkampanye politik.

Nevi menjelaskan bahwa dengan adanya perkumpulan ini, kaum perempuan juga dapat bersaing berebut suara dalam ajang pemilu.

“Sangat strategis sekaligus menjadi kampanye politik bahwa kaum perempuan tidak tabu berebut suara dengan kaum pria dalam ajang Pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah.” Ujar Nevi.

Aleg perempuan PKS ini menegaskan bahwa tidak boleh lagi adanya larangan bagi kaum perempuan untuk maju menjadi

anggota dewan maupun kepala daerah.

Nevi memiliki harapan bahwa meskipun berasal dari lintas partai, harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ibu ucapkan selamat atas pengukuhan KPP Wilayah Sumbar, meski perempuan lintas partai, KPP Wilayah Sumbar harus tetap solid dan semangat untuk bermanfaat kepada masyarakat.”



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

“Dengan adanya perkumpulan ini, kaum perempuan juga dapat bersaing berebut suara dalam ajang pemilu. Sangat strategis sekaligus menjadi kampanye politik bahwa kaum perempuan tidak tabu berebut suara dengan kaum pria dalam ajang Pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah



Hadiri Musrenbang di Dapil, Anis: Kegiatan ini **Harus Memotret** Kebutuhan Warga

KUTIPAN

Jakarta (03/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menghadiri acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, pada Selasa (2/2/2021).

Anis hadir secara virtual atas undangan dari Lurah Kebon Pala, Faizal Rizal. Selain dihadiri oleh stakeholder dari berbagai unsur masyarakat, acara Musrenbang ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Timur, Hendra Hidayat, dan Camat Kecamatan Makasar, Kamal Alatas.

Terkait dengan Musrenbang yang diselenggarakan di Kelurahan Kebon Pala ini, Anis berharap forum ini bisa betul-betul menyerap aspirasi masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat yang paling tahu tentang kondisi wilayahnya.

"Mudah-mudahan usulan ini betul-betul usulan yang bisa di validasi pada hari ini sehingga nanti kecamatan mendapatkan usulan-usulan yang valid. Kemudian dinaikkan

lagi sehingga pemerintah DKI Jakarta bisa mengupayakan pembangunan Kota Jakarta ini baik fisik maupun non fisik dengan tepat sasaran,"katanya.

Politisi senior PKS ini juga menegaskan bahwa Musrenbang seyogyanya bisa betul-betul memotret dengan lebih jelas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari laporan Lurah Kebon Pala yang disampaikan di awal acara, Anis menyimak masih didominasi pembangunan fisik sebagai kebutuhan masyarakat.

"Saya kira ini tidak salah, karena memang bagaimana masyarakat bisa hidup dengan tenang dan layak ketika pembangunan fisik ini belum terlaksana. Saya tidak menafikan bahwa itu menjadi kebutuhan agar masyarakat

kita hidup bisa dengan lebih layak dan tenang, kalau rumahnya tidak kebanjiran lebih tenang, anak-anak bisa sekolah lebih tenang walaupun masa pandemi belajar daring," ungkapnya.

Anis juga menekankan bahwa pembangunan fisik itu penting, tapi pembangunan non fisik juga tidak kalah penting.

"Meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi keilmuan, teknologi dan juga meningkatkan kualitas keberagaman warga, merupakan contoh dari pembangunan non fisik," tambahnya.

Dalam kesempatan berharga dalam pertemuan dengan masyarakat ini, Anis juga menyinggung tentang kondisi pandemic yang menurutnya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Anis menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dengan kasus Corona tertinggi yaitu tembus diatas 1 juta orang terpapar.

"Angka ini jauh diatas Pakistan yang jumlah warganegaranya hampir sama dengan Indonesia yaitu sebanyak 224 juta jiwa. Namun, kasus Corona yang terjadi



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Mudah-mudahan usulan ini betul-betul usulan yang bisa di validasi pada hari ini sehingga nanti kecamatan mendapatkan usulan-usulan yang valid. Kemudian dinaikkan lagi sehingga pemerintah DKI Jakarta bisa mengupayakan pembangunan Kota Jakarta ini baik fisik maupun non fisik dengan tepat sasaran"

hanya berjumlah 500 ribu-an," sebut Anis.

Anis mengatakan bahwa upaya-upaya telah dilakukan pemerintah harus diimbangi dengan disiplin warga. Dan kedua hal tersebut menentukan tingkat penyebaran virus

Corona.

Menutup sambutannya, Anis mengajak seluruh peserta yang hadir untuk terus menjaga Kesehatan dan disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungi Kader PKS di Purwakarta, Nur Azizah Beri Motivasi dan Berbagi Pengalaman

KUTIPAN

Purwakarta – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A. M.A, pada Rabu (21/1), bersilaturahmi dengan kader-kader PKS Kabupaten Purwakarta di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Purwakarta

Kedatangan Nur Azizah ditemani sang suami Dr. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. yang merupakan Presiden Partai Keadilan pertama pada tahun 1998, sebelum berubah nama menjadi PKS. Di hadapan para kader, Nur Azizah memberikan motivasi dan berbagi pengalamannya sebagai kader PKS yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS.

Kehadiran Nur Azizah dan suami disambut kader-kader Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Kabupaten Purwakarta. Di hadapan kader BPKK, Nur Azizah memberikan motivasi agar terus menjadi ummahat

yang berdaya tidak hanya untuk keluarga kecilnya tetapi juga harus terus berkarya dan berkiprah dalam skala yang jauh lebih luas, untuk masyarakat.

"Insya Allah kader BPKK PKS di sini sudah banyak kontribusinya di masyarakat. Kita harus terus berjuang untuk menderaskan masyarakat. Tentu kita harus terus mengambil peran itu, membuat menjadi bagian dari masyarakat dari skala terkecil di tingkat RT dan RW, hingga skala besar di negeri ini", jelas Nur Azizah.

Ia mengajak agar perempuan jangan takut mengambil peranan lebih besar di masyarakat. Nur Azizah turut berbagi pengalamannya

sebagai satu-satunya anggota perempuan di Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS. Dimana ia banyak bersinggungan langsung dengan urusan sosial, keagamaan, kebencanaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Nur Azizah turut berbagi pengalaman, sebelum menjadi anggota DPR RI ia juga pernah menjadi Ketua Rumah Keluarga Indonesia (RKI) tingkat kecamatan, di bawah naungan PKS Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Selain itu, ia juga menceritakan pengalamannya Ketika menjadi Ketua TP-PKK Kota Depok saat sang suami Nur Mahmudi menjabat sebagai Walikota Depok periode 2006-2016.

"Saat menjadi istri Walikota, secara rutin saya mengisi kajian bulanan di Masjid Balaikota Depok, sebagai bentuk syiar menyampaikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada para pengurus agar memiliki pemahaman agenda yang benar, tulus ikhlash dan bersemangat dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Alhamdulillah setiap



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Sebagai kader, jangan pernah takut untuk berkiprah lebih luas, menjadi agen pembawa perubahan yang membawa kebaikan. Tidak terkecuali kita, perempuan, teruslah berkontribusi. Jangan takut untuk berinovasi dan berkarya di tengah masyarakat"

bulannya rutin dihadiri ibu-ibu perwakilan pengurus PKK kelurahan dan kecamatan se-Kota Depok serta para pengurus TP PKK Kota Depok yang jumlahnya sekitar 500 orang. Alhamdulillah mereka

begitu antusias setiap bulannya datang ke kajian, sekaligus bersilaturahmi dan memperbaharui semangat pemberdayaan", terang Nur Azizah
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SELAMAT

Atas Penghargaan yang diterima
Anggota Fraksi PKS DPR RI
H.M. Nasir Djamil, M.Si sebagai
Sahabat PWI dalam malam resepsi
Hari Pers Nasional di Banda Aceh



Terkait Perpres BRIN, Wakil Ketua FPKS Desak Pemerintah Perhatikan Karir Peneliti

KUTIPAN

Jakarta (30/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk memperhatikan nasib para peneliti, terkait dengan penataan kelembagaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

"Pasalnya, hingga saat ini Perpres BRIN belum diterbitkan namun unit organisasi penelitian di Kementerian/Lembaga (K/L) sudah akan dihapus, termasuk di Badan Keahlian DPR RI. Hal ini tentu membuat resah para peneliti sebab terkait dengan masa depan karir mereka," ungkapnya.

Mulyanto menambahkan Pemerintah harus lebih berhati-hati membuat aturan lembaga terkait peneliti ini. Sebab sebelumnya ada preseden buruk bagi para peneliti, melalui UU ASN (aparatur sipil negara) dan peraturan turunnya terkait dengan klausul batas usia

pensiun.

"Akibat aturan tersebut terdapat lebih dari 500 peneliti, termasuk perekayasa, terkena penalti. Peneliti yang usianya terkena batas itu langsung pensiun, tanpa ada pengaturan yang bersifat transisional," ujar Mulyanto.

Kondisi sekarang akan lebih parah, sebab jumlah peneliti yang ada di K/L lebih dari 500 orang. Karena unit kerja penelitian mereka akan dihapus, mereka diminta untuk sementara pindah ke unit kerja lain yang non-penelitian. Nanti, setelah Perpres BRIN terbit barulah ditentukan kembali unit

kerja mereka, apakah bergabung dengan BRIN atau tidak.

"Kami akan upayakan Pemerintah untuk lebih cermat terkait pembentukan lembaga BRIN ini. Sejak beberapa bulan lalu PKS gencar menyuarakan agar Pemerintah segera mengeluarkan Perpres agar pihak terkait mempunyai dasar hukum yang dapat menjadi acuan," demikian dikatakan Mulyanto menanggapi aspirasi Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), yang disampaikan kepada FPKS (29/1). Hadir tokoh Himpenindo Prof. Dr. Husein Akil dan Dr. Agus Fanar Sukri.

Untuk diketahui Perpres BRIN sendiri hampir 2 tahun digodok belum juga terbit. Akibatnya kelembagaan, SDM, anggaran dan program Kemenristek/BRIN berjalan secara tersendat-sendat.

"Tanpa legalitas kelembagaan, maka secara birokratis unsur-unsur organisasi menjadi bersifat sementara. Hal lain yang juga meresahkan pegawai di lingkungan Kemenristek/BRIN," papar Mulyanto.

Sementara itu menurut data LIPI tahun 2018, jumlah pejabat fungsional peneliti ada sebanyak 9.661 orang. Dari jumlah tersebut, peneliti terbanyak bekerja di Badan Litbang, Kementerian Pertanian sejumlah 1.850 orang atau sebesar 19%. Baru setelah itu adalah peneliti yang ada di LIPI sejumlah 1.715 orang atau



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

“Tanpa adanya para peneliti ini mustahil Indonesia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif nasional dan masuk menjadi negara berbasis inovasi (innovaton driven economy), yang keluar dari ketergantungan atas sumber daya alam yang kian menipis”

sebesar 18% dari total peneliti yang ada di K/L.

Memang ada tren kenaikan kuantitas sejak 2010. Pada 2010 jumlah peneliti di Indonesia mencapai 7.502 orang, pada 2012 berjumlah 8.075 orang. Angka terus meningkat menjadi 9.128 orang pada 2014.

Namun demikian bila dibandingkan dengan negara-

negara lain di kawasan ASEAN misalnya, jumlah peneliti kita masih terbilang sedikit. Rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk di Singapura adalah lebih dari 7 ribu peneliti per satu juta penduduk. Sedangkan di Malaysia sebanyak 2.590 peneliti per satu juta penduduk.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Terima Audiensi Himpenindo,

Fraksi PKS: Batalkan Perpres BRIN, Kembali ke Status Quo!

KUTIPAN

Jakarta (29/01) — Fraksi PKS DPR RI dalam hal ini Sekretaris Fraksi, Ledia Hanifa Amalia dan sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto dan Mulyanto menerima audiensi secara virtual dari Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dalam agenda rutin Hari Aspirasi Fraksi PKS.

Himpenindo meminta agar pemerintah menyediakan ekosistem riset dan inovasi, ia juga mendesak terbentuknya kelembagaan Riset dan Teknologi (Ristek)/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang berfokus pada lingkup pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi yang dilengkapi dengan perencanaan, koordinator dan administrator, pengalokasian sumber daya, pemantauan dan pengendalian, serta inovasi kebijakan pemajuan iptek.

Selain itu, Himpenindo

meminta dilakukan pendekatan 'hybrid' dalam konsolidasi terkait lingkup Kementerian Ristek/BRIN dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjiip) dan Sistem Pembangunan dan Penganggaran dalam integrasi nasional.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menyambut baik dan mengungkapkan kondisi dunia riset nasional yang terjadi.

"Aspirasi seperti ini memang sangat dibutuhkan bagi kemajuan dan keberlangsungan BRIN yang dari awal memang digagas menjadi ide yang sangat menarik, karena memang dunia riset di Indonesia jauh tertinggal dari belahan dunia yang lainnya, tetapi kita punya kekayaan yang begitu banyak, yang memang mungkin belum terkonsolidasikan dengan baik. Saya sangat sepekat dengan masukan bapak-bapak ibu-ibu semuanya." ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Dapil Banten III dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan dukungan dan mengaku terkejut mendengar penjelasan dari Himpenindo.

"Saya juga beberapa kali di media mendesak soal BRIN ini, tapi ketika saya mendengar dari bapak ibu sekalian hari ini, saya berubah pikiran, justru saya gak ingin mendesak agar segera Perpres itu terbit, justru udah batalkan saja Perpres itu, kembali ke status quo. Karena ini bukan soal perpresnya, substansinya masih kita perdebatkan sebetulnya," tuturnya.

Mantan Deputi Menteri Bidang Kelembagaan Iptek itu mengungkapkan kenyataan yang terjadi di ranah kementerian.

"Jadi saya lihat termasuk pak menteri juga kebingungan ya dengan hal ini, karena pak menteri merasa awalnya punya



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Jadi saya lihat termasuk pak menteri juga kebingungan ya dengan hal ini, karena pak menteri merasa awalnya punya otoritas untuk itu, pak menteri dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara –red) merumuskan, merasa punya otoritas, memang secara legal formal punya otoritas, tapi prakteknya ketika kasus ini terjadi baru sadarlah ini soal politis, di luar otoritas pak menteri.

otoritas untuk itu, pak menteri dengan Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara –red) merumuskan, merasa punya otoritas, memang secara legal formal punya otoritas, tapi prakteknya ketika

kasus ini terjadi baru sadarlah ini soal politis, di luar otoritas pak menteri. Jadi sekarang saatnya Himpenindo dan teman-teman yang lain ini bersuara nyaring di media." tutup Mulyanto.

HNW: Mestinya Presidential Threshold **Tak Sampai Kebiri** Kedaulatan dan Membelah Rakyat Lagi

KUTIPAN

Jakarta (01/02) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan, agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden benar-benar menghayati ketentuan UUD NRI 1945,

dengan meninjau kembali soal besaran pengaturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

HNW sapaan akrabnya menuturkan bahwa besaran PT yang sebesar 20 persen yang berlaku saat ini dan sudah dipraktikkan pada Pilpres tahun 2014 dan 2019, telah menimbulkan banyak dampak negatif.

"Dengan PT yang sangat besar tersebut, pilihan capres yang tersedia semakin terbatas, dan terbukti pada Pilpres 2014 & 2019 hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat bisa maju dalam Pilpres. Sehingga rakyat dipaksa tidak

memiliki banyak pilihan, apalagi banyak Tokoh-tokoh Bangsa yang sangat layak memimpin Indonesia, tidak bisa dimajukan dalam kontestasi Pilpres karena tersandung dengan ketentuan soal Presidensial Threshold tersebut," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, ada lagi masalah serius yang berdampak panjang dengan hanya dua kandidat yang maju sebagai Capres/Cawapres yaitu terjadinya pembelahan di masyarakat sejak dari tingkat Rumah Tangga ke skala Negara.

"Kondisi yang dikhawatirkan akan sangat membahayakan harmoni, keutuhan dan kelanggengan NKRI. Memang tidak serta merta sebagaimana dikhawatirkan oleh Tokoh-tokoh yang mengajukan Judicial

Review ke MK agar Presidential Threshold ditiadakan atau 0%, bahwa adanya pembatasan akan hadirkan pembelahan dan tidak adanya alternatif calon kepemimpinan nasional, karena faktanya dalam Pilpres di Indonesia khususnya pada tahun 2004 & 2009 juga sudah diberlakukan pembatasan Presidential Threshold, sebesar 15%, dan menghadirkan alternatif calon Presiden yang cukup ; 5 kandidat (thn 2004) serta 3 kandidat (2009)," terang HNW.

Dan sesudah Pilpres, imbuhnya, juga tidak terjadi pembelahan ditengah masyarakat, sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 & 2019.

"Hal tersebut terjadi antara lain karena besara PT disepakati diangka yang proporsional. Nah sekarang dengan perkembangan pengalaman Pilpres dan hasilnya, serta tuntutan meluas dari masyarakat untuk hadirkan ketersediaan alternatif kandidat calon Presiden/Wakil Presiden, maka wajar saja bila batasan syarat pengajuan calon



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"DPR dan Presiden memang diberi kewenangan untuk mengatur besaran PT itu oleh MK. Namun, hendaknya, pilihan besaran PT yang ditentukan, jangan sampai yang mengabaikan perkembangan dan tuntutan Rakyat, apalagi bila berimplikasi kepada pengkebirian kedaulatan rakyat atau pembelahan masyarakat yang bisa jadi semakin parah,"

Presiden yang lebih bisa mengakomodasi kedaulatan Rakyat, semakin menjauhkan mereka dari keterbelahan, dan menguatkan praktek Demokrasi di Indonesia, dan dengan sudah diberlakukannya Pilpres serentak bareng dengan Pileg, maka wajar saja bila Pemerintah dan DPR

mempertimbangkan besaran Presidential Threshold yang sesuai dengan Electoral Threshold yang diberlakukan untuk Pileg, yang besarnya pada Pileg 2019 sebesar 4%, yang kemungkinan akan naik, tapi tak melebihi 5%," urainya.
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Peringati Harlah NU ke 95

Presiden PKS: NU Layak Jadi Guru bagi Kita Semua



Syaikhu_ahmad  .lkuti

Di usianya yang ke-95 tahun, Nahdlatul Ulama (NU) semakin menunjukkan eksistensinya. Itu dibuktikan dengan kontribusinya di berbagai bidang. Terutama pendidikan melalui pesantren yang tersebar di penjuru Nusantara



Liked by **fraksipksdpri** and 500 others

1 HARI YANG LALU



Presiden PKS Ahmad Syaikh: NU Layak Jadi Guru bagi Kita Semua

KUTIPAN

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) hari ini berusia 95 tahun. Ucapan selamat dan harapan terus mengalir, termasuk dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikh.

"Di usianya yang ke-95 tahun, Nahdlatul Ulama (NU) semakin menunjukkan eksistensinya. Itu dibuktikan dengan kontribusinya di berbagai bidang. Terutama pendidikan melalui pesantren yang tersebar di penjuru Nusantara," demikian dikutip dari akun Instagram @syaikh_ahmad_ Minggu (31/1/2021).

Syaikh kemudian menulis pesan Hadratusyaikh KH Hasyim Asy'ari yang terpatri betul pada kader-kader NU. "Bangsa tidak akan jaya jika warganya bodoh. Hanya dengan ilmu suatu bangsa menjadi baik."

Menurutnya, petuah ini terdapat dalam buku karya Muhammad Asad Syihab, Hadratusyaikh Muhammad Hasyim Asy'arie: Perintis Kemerdekaan Indonesia, terj.

KH A Mustofa Bisri, 1994: 18.

"Di masa Pandemi Covid-19, sumbangsih NU kian dirasakan masyarakat. Di awal wabah, PBNU melalui Satuan Tugas Nahdlatul Ulama (Satgas NU) Peduli Covid-19 memberikan berbagai macam bantuan untuk penanganan virus corona. Bantuan yang diberikan di antaranya 5.000 alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, 15.000 hand sanitizer, 190.000 masker untuk masyarakat terdampak."

Padaحال, kata Syaikh, keluarga besar NU menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Tercatat ada 112 pesantren NU di Indonesia yang terpapar virus corona dengan lebih dari 5.000 lebih santri dan kiai yang positif Covid-19. Ratusan kiai bahkan wafat selama pandemi, meski tidak

semuanya karena corona. Bercermin dari fenomena ini, lanjut Syaikh, kita sudah sepatutnya bersyukur memiliki NU. Kiprahnya tak diragukan lagi terutama ketika masa-masa sulit dialami bangsa dan negara kita.

"Dari NU kita harus belajar. Karena di usianya yang ke-95 tahun, NU layak menjadi guru bagi kita semua.

Selamat Hari Lahir NU."



"Di usianya yang ke-95 tahun, Nahdlatul Ulama (NU) semakin menunjukkan eksistensinya. Itu dibuktikan dengan kontribusinya di berbagai bidang. Terutama pendidikan melalui pesantren yang tersebar di penjuru Nusantara,"



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***